

PERAN SOEHARTO DALAM PERISTIWA G 30 S/PKI

Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Untuk Memenuhi Persyaratan
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA

PERAN SOEHARTO DALAM PERISTIWA G 30 S/PKI

Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Untuk Memenuhi Persyaratan
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh
Abdul Ghofur
103033227773

Dibawah Bimbingan

Dr. Nawiruddin, MA.
NIP. 19720105 200112 1003

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji serta rasa syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan dan menunjukkan jalan kebenaran yakni Islam kepada umat manusia di seluruh alam semesta.

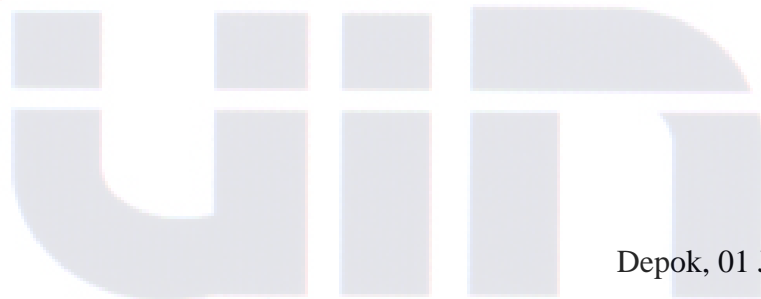
Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan dan pudarnya rasa semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini dalam rangka memperoleh gelar sarjana, namun berkat bantuan, dorongan dan semangat dari berbagai pihak, baik berupa moril dan materil, semua kesulitan tersebut dapat di atasi. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ketua Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Prof. Dr. Bachtiar Effendi, MA.
2. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Bapak Zaki Mubarak, MA.
3. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. Nawirudin, MA. Terima kasih atas pengarahan dan kritikan kepada penulis sampai selesainya skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan yang berlimpah, amin..
4. Ayah dan Ibu tercinta, H. Nurhasan (alm) dan Hj. Asiah Ibrahim yang telah mengasuh, membesarkan, membimbing dan mendidik serta selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis baik moril maupun

materil hingga selesainya skripsi ini. Semoga Allah mengasihi beliau sebagaimana beliau mengasihi penulis, amin...

5. Abang dan tetehku tersayang semua, yang selalu memberikan kritikan konstruktif kepada penulis, keponakanku yang memancing tawa riang selalu dalam kehidupan penulis serta kawanku semua di Indonesia.
6. Sahabatku di PPI angkatan 2003 dan tim KKN Kraksaan Probolinggo yang telah menunjukkan pasir berbisik di Bromo. Serta semua pihak-pihak yang telah membantu hingga selesai skripsi ini.

Dengan penuk kerendahan hati, penulis berdoa semoga Allah SWT membalas bantuan dan dorongan mereka semua dengan keangungannya, amin....



Depok, 01 Juni 2010

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Metode Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II MILITER INDONESIA DALAM RUANG LINGKUP SEJARAH.....	13
A. Sejarah Pembentukan Militer Indonesia	13
B. Dwi Fungsi Sebagai Legitimasi Politik Militer	18
1. Proses Terbentuknya Konsep Dwifungsi	19
2. Militer Sebagai Pertahanan dan Keamanan Negara	23
3. Militer Sebagai fungsi Sosial Politik	26
BAB III PROFIL PARTAI KOMUNIS INDONESIA.....	30
A. Sejarah Singkat Berdirinya PKI	30
1. Awal Gerakan Komunis	30
B. PKI Sebagai Instrumen Politik	34
1. Kepemimpinan PKI	34
2. Move PKI dibawah Muso	36
3. Move PKI dibawah Aidit	37
4. Penguatan Partai	40

BAB	IV	SOEHARTO DAN G 30 S/PKI	43
	A.	Peristiwa GESTAPU (Gerakan Tiga Puluh September) .	43
	B.	Soeharto dan Penumpasan G 30 S/PKI.....	50
		1.Biografi Singkat Soeharto	50
		2. Penumpasan G 30 s/PKI oleh Soeharto.....	52
	C.	Soeharto, Militer dan Supersemar	57
BAB	V	PENUTUP	
	A.	Kesimpulan	61
	B.	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		65



BAB I

PERAN SOEHARTO DALAM PERISTIWA G 30 S/PKI

A. Latar Belakang Masalah

Thomas Hobbes, filsuf Inggris, menjadi saksi perang saudara di Inggris pada penghujung abad ke-17. Demi darah yang ia lihat, memaksanya berkesimpulan bahwa manusia adalah serigala bagi manusia yang lain (*homo homini lupus*). Menurut Hobbes sifat buruk manusia tersebut harus ditundukkan dengan cara penandatanganan kontrak (*social contract*). Produk dari penandatanganan itu di sebut negara, tempat segala bentuk sifat buruk manusia di tundukkan melalui UU yang telah di sepakati bersama melalui parlemen atau anggota legislatif yang telah dipilih oleh rakyat sebagai wakilnya dalam mengakomodir setiap permasalahan rakyat dari negara tersebut.¹

Dalam sebuah negara masalah pertahanan dan menjaga stabilitas keamanan menjadi sangat penting, apalagi negara yang baru merdeka dari kolonialisasi. Maka peran militer, menjadi sangat sentral dalam negara yang baru terbentuk. Militer merupakan kelompok orang-orang terorganisir dan disiplin. Salah satu tugasnya adalah untuk menjaga negara dari rongrongan pihak luar maupun dalam. Menurut Muhammad Hatta, hakikat tugas militer yang sebenarnya dalam negara, ialah melatih diri dan mengadakan perlengkapan untuk menghadapi musuh dari luar, mereka harus bertanggungjawab dalam berbagai bidang keamanan dan keselamatan umum.²

¹ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: Gramedia pustaka Utama, 2001)

² Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, (Djakarta: Pandji Masyarakat, 1960), Cet ke-1, h.

Dari konsep di atas maka akan muncul pikiran bahwa fungsi militer di dalam negara adalah melakukan tugas dibidang pertahanan dan keamanan, yang disebut fungsi militer. Sedang tugas di luar bidang pertahanan dan keamanan menjadi tugas masyarakat sipil. Tugas ini disebut fungsi non militer atau fungsi sipil, dengan demikian akan terdapat perbedaan yang jelas tentang prinsip, tanggungjawab dan fungsi pokok antara golongan militer dan golongan sipil dalam kehidupan bernegara.³ Akan tetapi di negara-negara yang baru berkembang, kaum militer dalam kadar yang berbeda-beda dan dengan variasi yang bermacam-macam melakukan fungsi-fungsi social politik dengan memikul tugas-tugas sipil, bahkan militer bukan sekedar ikut berpartisipasi di dalam urusan-urusan politik, tetapi pada banyak negara mereka memegang peranan-peranan politik yang lebih dominan bahkan melebihi kaum sipil itu sendiri.

Ada beberapa sebab yang mendorong militer secara aktif memasuki arena politik dan memainkan peranan politik. *Pertama*, karena adanya ketidakstabilan sistem politik. Keadaan seperti ini akan menyebabkan terbukanya kesempatan dan peluang yang sangat besar untuk menggunakan kekerasan dalam kehidupan politik; *kedua*, karena kemampuan golongan militer untuk mempengaruhi atmosfer kehidupan politik, bahkan memperoleh peranan-peranan politik yang menentukan. Yang menarik dalam kaitan ini adalah, dalam beberapa hal dominasi militer justru diundang dan dipermudah oleh golongan sipil. Ini biasanya terjadi sewaktu pemimpin sipil mengambil keputusan untuk memperbesar personel militer atau meningkatkan persenjataan militer yang diperlukan untuk menghadapi musuh dari

³ Yahya A Muhaimin, *Perkembangan Militer Dalam Politik Indonesia 1945-1966*, (Yogyakarta : UGM Press, 1982), h. 2.

luar atau untuk mengatasi pergolakan politik dalam negeri; *ketiga*, karena *political perspective* kaum militer. Yaitu: mengenai peranan dan status mereka di dalam masyarakat dan juga berkenaan dengan persepsi mereka terhadap kepemimpinan kaum sipil dan terhadap sistem politik secara keseluruhan.⁴

Asal mula Militer Indonesia adalah kumpulan pemuda bentukan belanda yang tergabung daam *Koninklyk Nederlandsch-Indisch Leger* (KNIL) dan Pembela Tanah Air (PETA) pada jaman Jepang. Selain bentukan pemerintah kolonial baik Belanda maupun Jepang. Milisi sipil di Indonesia telah merebak, diantaranya yang paling dikenal militansinya antara lain Laskar Hijbullah, dan Pesindo pada masa awal revolusi fisik. Dua milisi yang disebutkan terakhir adalah milisi yang dilikuidasi keberadaannya oleh Pemerintahan Mohamad Hatta dalam rangka membentuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) profesional yang ditulangi-punggungi oleh alumni-alumni *Koninklyk Nederlandsch-Indisch Leger* (KNIL) dan Pembela Tanah Air (PETA).⁵

Perpolitikan Indonesia juga tidak lepas dari militer, sejak berdirinya bangsa ini, militer telah terlibat dalam pengambilan kebijakan politik yang semestinya menjadi tanggungjawab sipil. Bahkan dalam kesimpulan Salim Said sebagaimana yang dikutip oleh Eep Saipullah Fatah menyebutkan bahwa keterlibatan militer dalam politik sama tuanya dengan dengan sejarah republik ini.⁶

⁴ Muhaimin, *Perkembangan Militer Dalam Politik Indonesia 1945-1966*, h. 4.

⁵ *Premanisme politik*, h. 8

⁶ Salim Said, *The Genesis of Power: "Civil-Military Relation in Indonesia During The War for Independence 1945-1949,"* (Thesis, Ohio State University, 1985), h. 96.

Setidaknya mulai terlihat pada tahun 1946⁷ tatkala militer mempertanyakan kemampuan supremasi pemerintahan sipil.⁸

Kecenderungan ini semakin kuat setelah pada tahun-tahun berikutnya mereka harus mengatasi bukan hanya ancaman dari luar (Belanda), tetapi juga mengatasi peristiwa politik yang kritis, yaitu pemberontakan komunis di Madiun pada tahun 1948.⁹ mungkin dari sudut inilah, keterikatan militer dalam politik Indonesia di awal kelahirannya adalah sebuah kesadaran politik “agung” untuk menyelamatkan negara dari rongrongan pihak luar, bukan karena loyalitas sempit pada penguasa atau sekedar mencari tempat dalam struktur politik yang ada.¹⁰ Walaupun lambat laun hal yang bersifat patriotisme dan nasionalisme secara implisit akan tercampakan oleh kekuasaan yang berafiliasi pada pemahaman materialisme.

Peran militer ini ternyata tidak hanya terjadi pada masa revolusi fisik, tetapi terjadi juga pada masa pra-pengakuan kedaulatan. Hal ini tampak jelas pada tahun 1952, tatkala terjadi peristiwa yang kemudian di kenal dengan peristiwa 17 Oktober.¹¹ Kejadian yang kiranya dapat disebut “*politico military syndrome*” tersebut meletus karena kepemimpinan sipil dianggap *selfish* (arogansi individu), tidak bertanggungjawab, tidak efektif, penuh korupsi, dan tidak berhasil dalam memerintah negara yang baru merdeka akan tetapi justru militer merasa

⁷Yahya A Muhaimin, *Perkembangan Militer Dalam Politik Indonesia 1945-1966*, (Yogyakarta: UGM Press, 1982), h. 40

⁸ Eep Saipullah Fatah, *Penghianatan Demokrasi ala Orde Baru: “Masalah dan Masa Depan Demokrasi Terpimpin Konstitusional”*, (Bandung : Rosda Karya, 2000), h. 135.

⁹ Muhaimin, *Perkembangan Militer*, h. 47

¹⁰ Fachry Ali, *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan; “Keharusan Demokratisasi Dalam Islam Indonesia,”* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 29.

¹¹ Yahya Muhaimin, *Perkembangan Militer*, h. 65

memegang andil paling besar dalam menegakkan kemerdekaan pada masa 1945 – 1950.¹²

Bahkan pada bulan Juli 1958, militer diakui sebagai kekuatan politik golongan fungsional dan wakil-wakil militer berhasil didudukkan dalam lembaga Negara Dewan Nasional, yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan SOB¹³ yang oleh Daniel S Lev dinamakan, *the army's political charter* (memberikan dasar hukum kepada militer untuk melakukan fungsi-fungsi non militer, terutama pada hal yang berkaitan dengan politik). Staat Van Oorlog En Van Beleg (SOB) merupakan badan negara pusat yang sangat besar perannya dalam membuat keputusan politik.¹⁴

Perkembangan yang berjalan antara tahun 1955-1965 merupakan suatu pergulatan sengit, antara kepentingan politik yang berhaluan antara militer, umat Islam dan PKI . karena partai-partai Islam pada masa Pemilu 1955 merupakan bagian sentral dalam pemerintahan, hal itu dapat di lihat dari perolehan suara yang di raih oleh partai Islam. Masyumi memperoleh kursi 60 suara, NU 47 suara, PSSI 8 suara dan Perti 4 suara.¹⁵ Dengan suara yang cukup banyak ini (hampir ½ suara parlemen), partai Islam kembali mengangkat persoalan dasar negara yang di awal kemerdekaan terhenti oleh agresi Belanda. Isu inilah kiranya yang kemudian

¹² Yahya Muhaimin. *Perkembangan Militer Dalam Politik Indonesia 1945-1966*, h. 12.

¹³ SOB (Staat Van Oorlog En Van Beleg) merupakan badan negara pusat yang sangat besar perannya dalam membuat keputusan politik. Yahya Muhaimin, *Perkembangan Militer*, h. 71

¹⁴ *Ibid.*, h. 13

¹⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1985), Cet. Ke-1, h.

menghangat dan menjadi perdebatan sengit dan berakhir dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 atas dukungan militer.¹⁶

Fenomena politik selanjutnya setelah kekuasaan berada ditangan presiden dan militer, maka kedua kekuatan politik tersebut berupaya untuk melemahkan kekuatan yang berasal dari partai politik, termasuk dengan membubarkan Masyumi¹⁷ dengan alasan demi kesatuan bangsa Indonesia saat itu. Akibatnya keberadaan militer semakin terbuka luas untuk memainkan peran politiknya. Lebih nyata lagi setelah keberadaannya diterima sebagai golongan fungsional dalam parlemen.

Sejak saat itu peran militer dalam bidang politik semakin mewarnai terhadap perjalanan politik bangsa Indonesia. Kembalinya mekanisme politik bangsa Indonesia pada UUD 1945 tidak terlepas dari campur tangan militer. Nasution lah yang mengusulkan pada presiden agar kembali pada UUD 45 setelah melihat kenyataan politik dari ketidakmampuan pihak sipil dalam menyelesaikan tugasnya dalam dewan konstituante.¹⁸

Pasca peristiwa dekrit tersebut timbulah istilah Dwifungsi atau “jalan tengah”¹⁹ yang sebetulnya sudah di cetuskan oleh Nasution pada tahun 1958 yang secara tersirat mengimplikasikan tentang legitimasi militer dalam berpolitik yang hal ini ditafsirkan secara fleksibel oleh beberapa kalangan militer hingga

¹⁶ A. Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 173

¹⁷ A. Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kali Jaga Press, 1998), h. 79

¹⁸ Muhammad Rusli Karim, *Peranan ABRI Dalam Politik*, (Jakarta: Hajimas Agung, 1993) h. 31

¹⁹ Abdoel Fatah, *Demiliterisasi Tentara Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*, (Yogyakarta: LKIS, 2005) h. 107

kemudian militer dikembangkan perannya tidak lagi sebatas salah satu kekuatan sosial politik, tetapi memiliki peran yang dominan dan luas di bidang non Hankam²⁰

Perkembangan politik era 60-an adalah merupakan pergulatan sengit tetapi terselubung antara militer melawan PKI sebagai satu-satunya partai politik yang dominan karena perlindungan Soekarno, yang dengan tangkas berhasil memainkan peranan *balance of power* antara militer dan PKI. Akhir dari kemelut itu ialah meletusnya peristiwa Gerakan Tiga puluh September (GESTAPU) 1965 yang kemudian mengakhiri era Soekarno dan PKI. Kejadian tersebut secara progresif memberikan peluang kepada militer untuk memainkan peran politiknya, karena peristiwa GESTAPU ini secara frontal mengakibatkan perubahan iklim politik yang besar dalam tatanan politik di Indonesia yaitu dengan bergesernya kekuatan politik dari pihak sipil ke militer secara dominan.²¹

Pada masa inilah nama Soeharto mulai muncul ke permukaan walaupun dalam hal ini Soeharto bukanlah anggota militer kelas bawah yang notabennya hanya menjadi ajudan para jenderal-jenderal. Nama Soeharto melambung ketika terjadi peristiwa serangan fajar 1 Maret 1959 yang dilakukan pada pagi hari dalam peristiwa perang gerilya melawan Belanda hingga nama Indonesia dianggap sebagai Negara yang berdaulat dengan bukti ketangguhan dari para militernya.

Sejak kejadian dramatis pada tanggal 1 Oktober 1965, muncul berbagai pertanyaan terhadap sikap PANGKOSTRAD Mayor Jenderal (waktu itu)

²⁰ Cholisin, *Militer dan Gerakan Pro Demokrasi Indonesia: Study Analisis Tentang Respon Militer Terhadap Gerakan Pro-Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002). h. 40

²¹ Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1990) h. 46

Soeharto yang sangat menentukan dalam perkembangan lebih lanjut. Yang dalam catatan sejarah bangsa Indonesia menyimpulkan bahwa penumpasan PKI pasca peristiwa 1965 tidak akan berhasil secara brilian tanpa adanya Soeharto. Akan tetapi pasca peristiwa reformasi 1998, muncul berbagai spekulasi akan keterlibatan Soeharto dalam peristiwa G 30S/PKI. Ada beberapa argumentasi yang urgen dalam menganalisa mengapa Soeharto bisa dikatakan sebagai tertuduh.

Hal pertama yang mengherankan berbagai pengamat adalah mengapa Soeharto tidak tercantum dalam daftar para jenderal yang akan di culik itu, padahal secara jabatan Soeharto merupakan Panglima Komando Strategi Angkatan Darat yang bertanggung jawab terhadap sikap militer dalam menyikapi situasi politik yang berkembang saat itu. Hal kedua adalah Soeharto mempunyai hubungan pribadi yang baik dengan tiga orang militer yang merupakan aktor-aktor penting dalam peristiwa G 30S/PKI yaitu : Supardjo, Untung dan Latief.

Dengan berjalannya waktu sejak kejadian tanggal 1 Oktober 1965, dan dampak yang kemudian menyusul, seperti keadaan Negara yang berada di jurang perang saudara, pecahnya kongsi-kongsi yang di bangun oleh Soekarno untuk melegalkan kembali dirinya sebagai Presiden seumur hidup dan pembunuhan massal kader ataupun massa pasif dari PKI yang notabennya dilakukan oleh umat Islam sebagai dampak dari dogma ateis nya PKI yang dimunculkan oleh beberapa media massa yang berhaluan pada kepentingan Soeharto dan militer saat itu.

Jika kita amati proses perubahan politik yang terjadi di Indonesia sejak akhir 1965 sampai dengan bulan Juli 1967 terdapat beberapa gambaran tentang

Soeharto dan militer melakukan perangkulan politik terhadap kekuatan politik tertentu.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai sejauh mana peran politik yang dilakukan oleh Soeharto dan Militer pada peristiwa G 30 S/PKI sampai dengan sidang istimewa MPRS 1967 yang memiliki beberapa kecenderungan diantaranya : 1). Aksi pengganyangan PKI oleh Soeharto dan Militer. 2). Upaya Soeharto dan Militer untuk membekukan PKI secara politik. 3). Upaya Soeharto dan militer untuk membentuk format politik yang baru. Maka untuk menggambarkan peran-peran politik Soeharto dan militer tersebut, skripsi ini penulis beri tema **“PERAN SOEHARTO DALAM PERISTIWA G 30 S/PKI ”**.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Untuk lebih mengarahkan penelitian yang akan dilakukan, maka penulis perlu membatasi permasalahan dalam penelitian ini pada peran politik Soeharto dan militer , khususnya pada peristiwa G30S/PKI 1965 sampai dengan sidang istimewa MPRS 1967, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja peran Soeharto dan militer pada peristiwa G30 S/PKI 1965 dan penumpasan PKI secara struktur organisasi maupun sebagai kekuatan politik saat itu ?
2. Bagaimana dampak politiknya bagi Soeharto dan militer pasca peristiwa tersebut ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengenai tujuan penelitian skripsi ini, ialah :

1. Secara akademis tujuan penyusunan adalah sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S-1) pada Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta,
2. Mencari implikasi tentang posisi Soeharto dan militer selaku alat pertahanan negara baik secara politik atau kesejahteraan militer itu sendiri sebelum dan pasca peristiwa G30S/PKI 1965.
3. Mencari jawaban dari perumusan masalah tentang apa saja peran Soeharto dan militer pada peristiwa G30S/PKI 1965 dan penumpasan PKI secara organisasi maupun sebagai kekuatan politik saat itu dan bagaimana dampak politiknya bagi Soeharto dan militer pasca peristiwa G 30/S PKI 1965.

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif atau kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan datanya adalah melalui dokumentasi, yaitu dengan mencari data mengenai masalah bersangkutan melalui literatur buku, surat kabar, majalah,²² internet dan sebagainya, yang berhubungan dengan politik militer terutama yang berkaitan dengan peristiwa G 30/S PKI untuk mengetahui sejauhmana peran militer baik secara structural ataupun individu-individu yang mempunyai posisi penting dalam struktur militer dan tentu saja bisa juga memanfaatkan jabatannya untuk mengambil keputusan penting dalam peristiwa tersebut hingga berdampak pada posisi militer dalam percaturan politik

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), h. 206.

pasca peristiwa tersebut. Sebelumnya, penulis telah melakukan observasi awal pada sumber-sumber primer mengenai politik militer di Indonesia dari masa ke masa yang lengkap dan akurat diberbagai tempat .

Adapun tehnik analisis data yang digunakan, adalah deskriptif-analisis. Sebagaimana ditunjukkan oleh namanya, pembahasan deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai data-data dalam rangka menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah (pokok masalah).²³ Sedangkan analisis secara harfiah berarti uraian, namun dalam hal ini analisis berarti suatu bahasan dengan cara mengolah data, memberikan interpretasi terhadap data-data yang terkumpul dan tersusun. Jadi metode deskriptif-analisis adalah suatu pembahasan yang bertujuan untuk membuat gambaran terhadap data-data yang telah terkumpul dan tersusun dengan cara memberikan interpretasi terhadap data tersebut.²⁴ Adapun langkah-langkah penulis yaitu dengan mencari berbagai tulisan dan artikel-artikel yang berkaitan dengan peristiwa G 30S/PKI baik yang bersifat primer ataupun sekunder kemudian dijadikan bahan untuk membuat hipotesa yang berafiliasi dan berpola dari asumsi penulis dengan mencari korelasi tentang peran Soeharto dan militer dalam peristiwa G 30/S PKI berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan tentu saja opini dan kesimpulan akhir berlandaskan pada pemikiran penulis.

²³ Sunadi Suryabrata, *metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 18.

²⁴ Masri Singarinbun dan Sofian Effendi (ed), *Metode Peneletian Surve*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 63.

Untuk pedoman penulisan skripsi, penulis menggunakan buku *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi)* yang diterbitkan oleh CeQDA Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang akan diuraikan secara ringkas dari masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I : Berisi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, metodologi penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini menggambarkan secara umum tentang kemiliteran Indonesia yang terdiri dari mulai sejarah pembentukannya militer di Indonesia dan fungsi-fungsinya serta sejarah awal terbentuknya konsep Dwifungsi ABRI saat itu., juga mengenai aktor-aktor penting yang terlibat dalam politik militer saat itu.

BAB III :Bab ini membahas tentang Profil Partai Komunis Indonesia serta Kelangsungan PKI dari masa ke masa , dalam hal ini meliputi bagaimana PKI di bawah pimpinan Musso hingga Aidit..

BAB IV :Dalam bab ini membahas seputar penelitian penulis, meliputi Biografi Soeharto dan peran militer dalam peristiwa G30S/PKI serta kontroversi tentang SUPERSEMAR yang hingga kini masih menjadi perdebatan juga tentang detik-detik menjelang Sidang Istimewa MPRS 1967 dan bagaimana dampaknya bagi perjalanan bangsa Indonesia selanjutnya.

BAB V :Bab ini berisi beberapa kesimpulan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini serta beberapa saran-saran yang berguna bagi pengembangan kajian-kajian serupa.



BAB II

MILITER INDONESIA DALAM RUANG LINGKUP SEJARAH

A. Sejarah Pembentukan Militer Indonesia

Militer merupakan alat pertahanan dan keamanan negara dan juga sebagai salah satu kekuatan politik yang ada di Indonesia. Dalam sejarahnya, militer Indonesia lahir bersama-sama dengan meletusnya revolusi rakyat, ia lahir dari anak-anak rakyat sendiri dalam mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, militer lahir dan tumbuh dengan kesadaran untuk melahirkan kemerdekaan, membela kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Bentuk pertamanya adalah BKR (Badan Keamanan Rakyat), badan-badan perjuangan dan kesatuan-kesatuan polisi. BKR dan badan-badan perjuangan ini kemudian berkembang melalui beberapa tahap menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI/ABRI).¹

Sejarah kemiliteran di Indonesia memiliki proses yang berhubungan dengan masa kolonialisme Hindia Belanda. Waktu itu sekitar tahun 1830, Hindia Belanda memerlukan pasukan yang cukup besar untuk memelihara keamanan dalam negeri. Pasukan militer itu disebut Tentara Kerajaan di Hindia Belanda (*Koninklijk Nederlandsh Indische Legen* atau KNIL)². Anggotanya terdiri dari

¹ Istilah militer, tentara, TNI atau ABRI adalah maksudnya sama. Tapi sebelum Angkatan Perang Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kepolisian republik Indonesia (POLRI) digabung tahun 1962, nama tentara Indonesia adalah TNI, setelah di gabung menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Namun ABRI baru populer di gunakan di era orde baru pasca di lakukan integrasi militer secara besar-besaran dan menggunakan doktrin gabungan Catur Dharma Eka Karma. Tapi setelah terjadi reformasi tahun 1998 PORI dipisahkan lagi dari ABRI, dan sebutqan ABRI kembali dengan TNI. (Abdoel Fatah, *Demiliterisasi Tentara Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*, (Yogyakarta: LKIS, 2005) h. 128

² KNIL atau tentara kerajaan di Hindia Belanda adalah tentara yang di bentuk oleh penjajah Belanda untuk kepentingannya. KNIL menjadi suatu kekuatan utama dalam menegakkan ketentraman di Jawa dan penaklukan di daerah-daerah Hindia Belanda lainnya. Beberapa token nasional Indonesia adalah hasil dari KNIL antara lain : AH. Nasution dan TB Simatupang. *Ibid.*, h. 45

serdadu pribumi dari golongan etnik terpilih dan korps perwira yang terdiri dari orang Belanda dan Indo-Belanda, sedangkan perwira Indonesia sangat sedikit jumlahnya.³ Begitupun ketika penjajah Jepang menguasai Indonesia, mereka membentuk pasukan militer keamanan untuk mengamankan daerah kekuasaannya dari pihak sekutu, pasukan didirikannya itu seperti PETA dan Heiho.⁴

Kelahiran Tentara Nasional Indonesia tidak bersamaan dengan kelahiran negara Indonesia pada proklamasi 17 Agustus 1945. sebelum lahirnya Tentara Nasional Indonesia, di Indonesia telah lahir bibit-bibit tentara yang berasal dari organisasi kepemudaan tadi seperti, Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA), Heiho (Pembantu Prajurit) Seinendan (Prajurit Pemula), Keibodan (Pasukan Keamanan), Hizbullah dan pemuda-pemuda mantan KNIL yang berasal dari berbagai golongan agama, aliran politik dan daerah, desa maupun kota. Merasa mempunyai tugas bersama untuk memelopori perjuangan kemerdekaan dan perebutan kekuasaan dari Jepang. Ini dikarenakan, para pemuda mempunyai semangat patriotik, sehingga pejuang bersenjata inilah yang kemudian sebagian besar meneruskan pengabdianya melalui organisasi ketentaraan yang bernama TNI. Tapi para pemuda yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan ketentaraan adalah KNIL dan PETA.

³ Iswandi, *Bisnis Militer orde baru: Keterlibatan ABRI Dalam Bidang Ekonomi dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Rezim Otoriter*, (Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya 2000), h. 25-26

⁴ PETA dan Heiho adalah pasukan yang dibentuk pada 3 oktober 1943 oleh penguasa Jepang yang dipimpin oleh soekarno untuk membantu tentara pendudukan apabila terjadi penyerbuan oleh sekutu. PETA dibentuk atas dasar territorial, tujuannya adalah bahwa pasukan ini akan merupakan perlawanan dari bangsa Indonesia terhadap penyerbuan oleh pasukan sekutu. Selain itu oleh para pemuda Indonesia organisasi ini dijadikan sebagai sarana latihan dalam persiapan Indonesia untuk membentuk tentara, meskipun dilatih oleh Jepang. Hal ini berbeda dengan KNIL yang pendidikan pelatihan militernya lebih kepada penyusunan struktur organisasi dan strategi. Abdoel Fatah, *Demiliterisasi Tentara*, h. 45

Untuk menguatkan barisan keamanan negara Indonesia maka organisasi-organisasi cikal bakal tersebut pada tanggal 22 Agustus 1945 melalui Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP),⁵ disatukan ke dalam sebuah badan yang bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR)⁶. BKR ini sebenarnya bukanlah suatu organisasi ketentaraan yang resmi, melainkan bersifat kerakyatan. Keanggotaan BKR didasarkan atas kesadaran individual. Badan ini didirikan baik di pusat maupun di daerah-daerah yang berada dibawah KNIP. BKR mempersenjatai, melengkapi dan membekali diri sendiri dalam mempertahankan kedaulatan negara dalam menghadapi ancaman pihak penjajah.

Di tiap-tiap residen para anggota bekas PETA dan Haiho secara aktif memimpin dan mengisi BKR dan tidak jarang mereka harus bertempur melawan pasukan Jepang, yang merupakan bekas pelatuhnya. Pemimpin-pemimpin BKR juga menjadi anggota Komite Nasional Indonesia (KNI) dan ikut serta di dalamnya untuk memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial budaya dan militer yang timbul di daerahnya. BKR bukanlah suatu tentara reguler, melainkan suatu korp pejuang bersenjata. KNI dan BKR menjadi organisasi-organisasi rakyat yang tidak sekedar untuk membantu, melainkan untuk mendorong dan memimpin revolusi⁷.

⁵ KNIP dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945. pembentukan KNIP bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat dan menggantikan PPKI itu sendiri yang dibentuk oleh Jepang. *Ibid.*, h. 46

⁶ BKR adalah suatu organisasi semi militer, bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Pada masa itu presiden Soekarno belum berani memberi nama terhadap gabungan organisasi bibit tentara tersebut karena agar tidak terjadi perlawanan oleh penjajah yang masih berada di Indonesia. *Ibid.*, h. 46-47

⁷ Nugroho Notosusanto (ed), *Pejuang dan Prajurit, Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991) h.38

Kenyataan kembalinya tentara penjajah untuk mempertahankan *status quo*, telah mengancam eksistensi kemerdekaan Indonesia. Hal ini membuat pemimpin Indonesia menyadari betapa pentingnya angkatan perang dalam mempertahankan kemerdekaan. Akhirnya pada tanggal 5 Oktober 1945 BKR di ubah menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dengan fungsi sama; menjaga keselamatan dalam negeri. Disini ada peningkatan status dari Badan menjadi Tentara. Peningkatan itu lebih tampak pada masuknya perwira-perwira didikan Belanda, pada bekas opsir KNIL yang pernah mendapatkan pendidikan staf, termasuk menjadi anggota TKR. Karakter inilah yang membedakan tentara PETA dan KNIL. Pendidikan staf yang diberikan KNIL ternyata sangat membantu melakukan tugas-tugas staf mereka lebih memenuhi persyaratan untuk tugas yang berkaitan dengan pengorganisasian dan perencanaan militer⁸.

Pada 1 Januari 1946 markas tertinggi TKR memprakarsai penetapan pemerintahan No 3/SD 1946 yang mengubah Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat dan mengubah Kementerian Rakyat menjadi Kementrain Rakyat menjadi Kementerian Pertahanan. Tidak lama setelah itu, pemerintah mengeluarkan maklumat yang mengubah Tentara Keselamatan Rakyat menjadi TRI (Tentara Reuplik Indonesia) pada tanggal 26 Januari 1946, maklumat tersebut menyatakan bahwa TRI bersifat nasional (kebangsaan) dan merupakan satu-satunya organisasi militer yang mengidentitaskan negara Indonesia.

⁸ Iswandi, *Bisnis Militer orde baru: Keterlibatan ABRI Dalam Bidang Ekonomi dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Rezim Otoriter*, (Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya 2000), h. 25-26

Namun, setelah itu terjadi polarisasi orientasi politik antara pihak Soekarno, Hatta dan Syahrir yang menganut strategi diplomatik dan pihak militer bersama laskar-laskar yang berorientasi pada strategi militer. Polarisasi tersebut mengancam persatuan dalam membendung usaha imperialis Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia. Sementara itu dalam tubuh barisan bersenjata sendiri masih terdapat friksi-friksi yang timbul dari laskar-laskar rakyat yang berorientasi pada ideologi induk partainya masing-masing.⁹

Guna mengatasi kemelut yang terjadi dalam tubuh militer, maka pada tanggal 5 Mei 1947 pemerintah mengeluarkan dekrit yang membentuk panitia yang diketuai oleh presiden yang beranggotakan 21 orang. Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional Indonesia ini menghasilkan keputusan yang dimuat dalam Penetapan Presiden. Penetapan yang dikeluarkan pada 7 Juni 1947 inilah yang membentuk organisasi TNI (Tentara Nasional Indonesia).¹⁰

Setelah presiden/panglima tertinggi mengeluarkan dekrit yang mempersatukan TRI dan laskar-laskar menjadi TNI pada tanggal 5 Mei 1947 dan kemudian dituangkan dalam penetapan presiden tertanggal 7 Juni 1947 yang antara lain menetapkan bahwa mulai tanggal 3 Juni 1947 telah disahkan dengan resmi berdirinya TNI serta segenap anggota angkatan perang yang ada dan segenap anggota laskar yang bersenjata dimasukkan serentak ke dalam TNI.¹¹

⁹ Muhammad Rusli Karim, *Peranan ABRI dalam Politik* (Jakarta : CV Haji Masagung, 1989) h. 23

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ G. Moerdianto, *Indonesia Abad ke 20 dari Kabangkitan Nasional sampai Lingkar Jati*, (Jakarta : Kanisius, 1992) h. 122-123

B. Dwi Fungsi Sebagai Legitimasi Politik Militer

Seperti yang telah dijelaskan di atas, setelah resminya terbentuk TNI sebagai tentara nasional yang berasal dari berbagai golongan masyarakat, elemen dan organisasi. Tentunya dari golongan itu ada yang setia kepada kepada organisasi politik yang mereka ikuti. Ketika mereka memasuki tentara, corak politik dan sikap organisasi masing-masing masih dibawa. Di samping itu perang gerilya melawan kolonial juga telah memaksa tentara melakukan tugas di bidang militer.

Pada masa itu perwira militer banyak mengurus masalah politik, pemerintahan, ekonomi dan sebagainya. Akhirnya tentara sering masuk campur tangan dalam urusan politik dan selanjutnya meningkatkan pengaruh militer dalam administrasi dan politik negara. Namun, setelah kejadian ini terjadilah keaburan antara fungsi militer dan fungsi bukan militer.¹²

Kenyataan di atas menunjukan bahwa sejak awal, ciri utama tentara Indonesia ialah ikut berpartisipasi dan berperan dalam bidang politik. Ini disebabkan kelemahan struktural yang belum mempunyai aturan yang jelas mengenai fungsi tentara dan kelemahan kultural yang menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi dalam berfikir dan bertindak dalam tubuh tentara itu sendiri. Dampak dari kenyataan tersebut dalam tubuh militer terbagi dua, ada TNI yang cenderung untuk ikut berperan di lapangan politik, sementara disisi lain ada

¹² Abdoel Fatah, *Demiliterisasi Tentara* h. 55

tentara yang sejak sebelum menjadi tentara memiliki pandangan mendukung partai politik tertentu.¹³

Peran TNI dalam politik pada masa perang kemerdekaan harus diakui manfaatnya, karena jika TNI pada masa perang berdiam diri, maka pemerintah tidak akan berjalan. Dalam perkembangannya peran TNI dalam bidang politik semakin menonjol, apalagi setelah tercetusnya konsep jalan tengah – dalam perkembangannya disebut Dwifungsi – yang dicetuskan oleh Nasution, dijadikan sebagai legitimasi peran militer dalam berpolitik.

1. Proses Terbentuknya Konsep Dwifungsi

Sejak awal kemerdekaan, militer dijadikan sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara. Hal ini dilakukan dengan caera melaksanakan perang kemerdekaan yang tidak mengenal kata menyerah dan juga militer telah menjadi aset perjuangan utuh dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. di samping sebagai fungsi pertahanan dan keamanan negara, militer pun mempunyai peran dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosial politik, yang kemudian dirumuskan dalam konsep “jalan tengah” oleh Nasution. Dalam perkembangannya konsep jalan tengah tersebut mengalami perubahan dalam pelaksanaannya, sehingga konsep tersebut lebih dikenal sebagai Dwifungsi, khususnya ketika masa orde baru.

Dwifungsi, yang kemudian menjadi bagian dari politik nasional, telah memperoleh legitimasi hukum. Salah satu diantaranya ialah melalui ketetapan

¹³ *Ibid*, h. 54

MPR RI NO. IV/MPR/1978. Dalam pelaksanaan doktrin pertahanan dan keamanan nasional militer (ABRI/TNI) yang tumbuh dari rakyat dan bersama rakyat untuk menegakan dan mengisi kemerdekaan, adalah inti dari sistem pertahanan kemanan rakyat semesta. Militer disamping sebagai kekuatan Hankam, juga merupakan kekuatan sosial politik.¹⁴

Konsep Dwifungsi ini mempunyai akar dan latar belakang sejarah yang panjang sejak berdirinya Tentara Republik Indonesia yang terbentuknya dengan sendirinya. Akibatnya, mereka merasa mempunyai hak yang sama dengan kaum sipil dalam menentukan kebijakan dan jalannya pembinaan negara. Selama terjadinya agresi Belanda pertama dan kedua, tentara sudah berperan dalam menjalankan pemerintahan, hal ini disebabkan lumpuhnya beberapa pemerintahan sipil di beberapa daerah. Selain itu terjadinya pemberontakan-pemberontakan menyebabkan tentara selalu menjadi alat “pemadam kebakaran” di dalam negeri. Dalam menjalankan pemerintahan dan menangani pemberontakan itu, telah membawa tentara pada hal-hal di luar bidang pertahanan.¹⁵

Di samping itu, presiden Soekarno pun secara konstitusional telah memberi kesempatan kepada tentara untuk ikut serta dalam mengurus negara melalui golongan fungsional. Dan juga setelah penetapan keadaan darurat perang telah membuat tentara masuk lebih dalam lagi pada perkara-perkara politik, ekonomi dan administrasi umum pengelolaan negara. Ini membawa persepsi pada tentara bahwa mereka sanggup dan mampu dalam melaksanakan tugas di luar bidang pertahanan, di samping melaksanakan tugas pertahanan negara.

¹⁴ Departemen Penerangan RI, *Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN): Ketetapan MPR RI NO IV MPR 1978*, (Jakarta : Deppen R, 1978) h. 52-53

¹⁵ Abdoel Fatah, *Demiliterisasi Tentara* h.138

Hal di atas disebabkan karena militer dan Soekarno, merasa tidak puas terhadap elit politik dan partai yang gagal menunjukkan prestasi yang baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Di samping itu, campur tangan politisi sipil ke dalam tubuh militer telah menciptakan kekecewaan pihak militer. Untuk mengatasi permasalahan ini, timbul beberapa pendapat dikalangan perwira tentang peran militer dalam bidang politik. *Pertama*, militer menerima apa saja posisi sebagai alat sipil, *kedua*, militer tidak harus memandang hanya dari sisi tehnik militer dalam menghadapi berbagai persoalan, tapi juga harus ikut dalam menyelesaikan berbagai krisis politik pada masa itu.¹⁶

Persoalan itulah yang melatari pemikiran bagaimana militer bisa ikut berpartisipasi dalam pembinaan negara tanpa mengambil kekuasaan atau mendirikan rezim militer. Hasil pemikiran tersebut akhirnya menimbulkan konsepsi “jalan tengah” yang merupakan pidato Abdul Haruis Nasution yang di sampaikan pada Dies Natalis Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang pada 13 November 1958, yang berbunyi sebagai berikut :

*“Posisi militer bukanlah sekedar alat sipil seperti di negara-negara Barat, dan bukan pula sebagai rezim militer yang memegang kekuasaan negara. Ia adalah sebagai sesuatu kekuatan sosial, kekuatan rakyat yang bahu membahu dengan kekuatan rakyat lainnya. Ia berbeda dengan sifat individualitas di satu pihak dan sifat totaliter di pihak lain, seperti yang dikenal di dunia barat dan timur”.*¹⁷

Isi pidato tersebut pada masa awal perkembangannya dianggap sebagai konsepsi awal tentang pemikiran Dwifungsi. Konsepsi jalan tengah tersebut mengandung makna sebagai berikut. *Pertama*, militer Indonesia tidak akan

¹⁶ *Ibid* h.139

¹⁷ AH. Nasution, *Dwi Fungsi ABRI: Pada mulanya dan Kini*, dalam Majalah Prisma, Edisi 12 Desember 1980, h.41

melakukan kudeta dan mendominasi kekuasaan. *Kedua*, militer Indonesia tidak akan bersikap pasif tetapi akan ikut terlibat dalam menentukan kebijakan negara. *Ketiga*, militer Indonesia adalah sebagai kekuatan sosial, di samping sebagai kekuatan pertahanan. *Keempat*, militer Indonesia hanya merupakan kekuatan sosial lainnya. *Kelima*, keikutsertaan militer Indonesia dalam politik adalah secara individual, bukan institusi.¹⁸ Sehingga dapat keikutsertaan militer di Indonesia semata-mata hanyalah ingin menggantikan posisi kekuatan presiden yang pada masa itu sudah terpengaruh oleh PKI

Dalam penjelasan konsepsi jalan tengah tersebut, Nasution menuntut bahwa keterlibatan militer dalam bidang politik bukan sebagai organisasi melainkan sebagai perseorangan-perseorangan yang menjadi eksponen dari organisasi militer. Ini tentu jelas berbeda dengan konsep dwifungsi di kemudian hari yang menekankan peranan politik lebih dalam kepada lembaga militer, bukan peranan eksponen atau perseorangan sebagaimana di maksudkan Nasution dalam pidato bersejarahnya tersebut.¹⁹

Perluasan peran konsep dwifungsi tersebut, dirumuskan kembali lewat seminar Angkatan Darat April 1965 yang menghasilkan doktrin Tri Ubaya Cakti, doktrin ini kemudian disempurnakan lagi dalam seminar Angkatan Darat II Agustus 1966, melalui doktrin itulah dirumuskan pertama kali konsep dwifungsi. Hasil seminar ini, merumuskan peran militer lebih kepada bidang sosial politik ketimbang bidang pertahanan keamanan nasional. Rumusan tersebut jelas tidak sesuai dengan konsep jalan tengah karena skopnya terlalu luas. Dari hasil seminar

¹⁸ Abdoel Fatah, *Demiliterisasi Tentara* h.141

¹⁹ Salim Said, *Tumbuh dan Tumbangnya Dwi Fungsi : Perkembangan Politik Militer Indonesia 1958-2000* (Jakarta : Aksara Karunia, 2002) h. 21-22

itulah, pengembangan dan pelaksanaan dwifungsi dilakukan dan menjadi rujukan yang dilakukan pada orde baru bagi peran militer dalam segala aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Landasan ini di pertegas lagi dengan adanya doktrin perjuangan ABRI yang di beri nama Catur Dharma Eka Karma²⁰ yang mengembangkan dan memperluas konsep dwifungsi.

Setelah seminar pertahanan dan keamanan itu, para elit orde baru merumuskan kembali jalan tengah konsepsi Nasution, dan menyatakan bahwa peran militer pertama-tama sebagai kekuatan pertahanan kemudian sebagai kekuatan sosial politik. Pada proses Permusan kembali konsepsi dari Nasution itu dimaksudkan sebagai pembenaran peran militer yang semakin luas dalam bidang-bidang non-militer pasca peristiwa G 30 S/PKI, namun bukan sekedar “jalan tengah” yang dirumuskan oleh Nasution.²¹

2. Militer Sebagai Pertahanan dan Keamanan Negara

Militer sebagai kekuatan pertahanan dan kemanan adalah aparatur negara yang menjalankan fungsi pertahanan keamanan negara untuk untuk mempertahankan negara dari serangan, ancaman, gangguan atau hambatan dari luar maupun dari dalam negeri.²² Letjen TNI (Purn) A. Hasan Habib salah seorang tokoh yang berperan aktif dalam seminar AD dan ABRI yang

²⁰ Catur Dharma Eka Karma (Cadek) adalah Doktrin ABRI sebagai kekuatan pertahanan dan kekuatan sosial politik, doktrin itu berlaku bagi semua Angkatan dan Polisi. Sebelumnya masing-masing Angkatan dan Polisi mempunyai doktrin sendiri yaitu: Tri Ubaya Cakti untuk TNI AD, Eka Casana Jaya untuk TNI AL, Swa Buana Paksa untuk TNI AU dan Tata Tentrem Kerta Raharja untuk Polisi. Doktrin CADEK tersebut dimaksudkan untuk mengintegrasikan ABRI dan memperkuat kesatuan ABRI (Soebijono [dkk] *Dwi Fungsi ABRI Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), h.125-126

²¹ Abdoel Fatah, *Demiliterisasi Tentara* h. 144

²² RZ Leirissa dan Zulfikar (ed) *Sejarah Nasional Di Indonesia: Lahir dan Perkembangnya Orde Baru*, (Jakarta : Proyek Inventarisasi dan Dokumen Sejarah Nasional,1993) h. 141

menghasilkan pemikiran-pemikiran tentang dwifungsi, terutama pada periode 1965-1969, mengatakan bahwa dalam mengemban fungsi pertahanan dan keamanan, tentara Indonesia adalah alat negara yang dikendalikan oleh pemerintah yang sah dan merupakan inti dalam sistem Hankamrata dan kekuatan Hankamnas, sama dengan angkatan perang lainnya di dunia.²³

Dibandingkan dengan angkatan perang lainnya di dunia, ABRI khususnya Angkatan Darat, mempunyai struktur luar biasa bahkan unik. Di negara lain kekuatan-kekuatan tentara terkonsentrasi di tempat-tempat tertentu, tetapi di Indonesia pasukan-pasukan angkatan darat tersebar kedalam kesatuan-kesatuan yang agak kecil di seluruh Indonesia. Dengan demikian ada pasukan militer pada tingkat Kodam, Korem, Koramil sampai Babinsa di desa-desa. Pasukan teritorial ini bertugas dalam bidang pembinaan wilayah.

Tugas pertama angkatan bersenjata ialah untuk mempertahankan negara dari ancaman luar. Ketika Indonesia baru merdeka, kemampuan TNI sangat terbatas untuk menghadapi musuh yang bersenjata modern, jadi sekiranya Indonesia diserang, tugas TNI bukan untuk mencegah pendaratan musuh diperbatasan tetapi untuk memobilisasikan seluruh rakyat untuk menghadapi musuh itu supaya musuh tidak dapat bertahan lama di Indonesia. Walaupun kekuatan militer Indonesia lebih besar, namun strategi HANKAMRATA (Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta) itu masih berlaku dan tetap di butuhkan untuk melindungi negara kesatuan republik Indonesia.

²³ Ikrar Nusa Bakti et.al *Tentara yang gelisah Hasil Penelitian YIPIKA tentang Posisi ABRI dalam Gerakan Reformasi*, (Bandung : Mizan 1999) h. 49

Tugas kedua angkatan bersenjata adalah untuk menjaga kesatuan negara. Dengan demikian kesatuan-kesatuan militer tersebar diseluruh pelosok Indonesia. Kesatuan-kesatuan itu di beri tugas untuk mencegah munculnya gerakan-gerakan yang bertujuan untuk merongrong dan memecahkan kepaduan negara. Strategi berdasarkan pada pengalaman Indonesia pada tahun 1950-an ketika pemberontakan terjadi di berbagai daerah di Indonesia, dan struktur teritorial memang sesuai untuk menghadapi ancaman tersebut.²⁴

Konsepsi pertahanan keamanan nasional disusun berdasarkan kebijaksanaan politik, ekonomi dengan sistematika :

1. Strategi revolusi Indonesia yaitu rakyat Indonesia harus menyelesaikan revolusinya yang bersifat nasional dan demokratis. Landasan revolusi adalah Pancasila dan harus disesuaikan siapa kawan siapa lawan hingga tercegah dari siasat politik adu domba yang di terapkan oleh Belanda.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Hankamnas: tujuan Hankamnas adalah mengamankan dan meyelesaikan revolusi dan tujuan hankamnas beraspek nasional dan internasional. Karena Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas aktif, maka politik pertahanan dan kemanan Indonesia harus bersifat difensif-aktif (sikap bertahan atau pembelaan), namun strategi perangnya berdasarkan sila perang ofensif.

²⁴ Iin Kendedes, *Implikasi Dwi Fungsi ABRI terhadap Partai Persatuan Pembangunan*, Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2004) h.24

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi Hankamnas; doktrin bahari dijadikan landasan geo-strategi secara geo-politik di lihat dari aspek statis dan dinamis.²⁵

3. Militer Sebagai fungsi Sosial Politik

Secara historis fungsi kedua militer sebagai kekuatan sosial politik, telah melekat sejak awal perang kemerdekaan pada tahun 1945. Militer lahir dari kebangkitan massa untuk kemerdekaan. Militer di sebut juga tentara rakyat atau tentara revolusi yang tumbuh menjadi tentara nasional yang profesional. Ciri dari tentara rakyat adalah kekuatan yang selalu terikat kepada kepentingan politik nasional. kekuatan yang selalu terikat kepada kepentingan nasional ini menjadi landasan historis bagi lahirnya peranan fungsi kedua atau dwifungsi.²⁶

Dari awal sejarahnya sebagai tentara gerilya yang memerangi kembalinya kekuasaan penjajah Belanda sampai konsolidasi kekuatan politiknya di bawah orde baru. Para perwira angkatan darat senantiasa melibatkan dirinya kedalam masalah-masalah politik. Dengan keikutsertaan sepenuhnya dalam perjuangan melawan kekuasaan Belanda itu, kebanyakan perwira tersebut menginginkan agar suara mereka di dengar dalam masalah politik semasa sesudah kemerdekaan. Setelah berlaku undang-undang keadaan darurat pada tahun 1957, hak dan peran serta mereka itu di beri pengakuan resmi melalui pengangkatan beberapa dari kalangan militer dalam kabinet, parlemen dan administrasi. Semasa zaman demokrasi terpimpin Angkatan Darat merupakan salah satu dari dua kekuatan politik penting yang terorganisasi dan bersama dengan presiden Soekarno

²⁵ RZ Leirissa dan Zulfikar (ed) *Sejarah Nasional*, h. 112-113

²⁶ *Ibid* h. 141

menguasai politik dewasa itu. Tapi akhirnya setelah pembersihan angkatan darat dari unsur PKI 1965 dan keberhasilannya menurunkan Soekarno dari kedudukannya, Menjadikan angkatan darat sebagai kekuatan dominan satu-satunya di Indonesia kala itu.²⁷

Fungsi militer sebagai kekuatan sosial politik merupakan salah satu unsur golongan karya yang secara aktif ikut serta dalam segala usaha dan kegiatan masyarakat untuk mencapai tujuan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan materil. Tugas-tugas kekaryaan militer sama sekali tidak berarti penyaluran tenaga militer ke dalam kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan. Kekaryaan militer merupakan sumbangan yang bisa di berikan oleh militer dari anggota-anggotanya yang terbaik kepada negara dan bangsanya di luar tugas-tugas pokok militer sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan.²⁸

Ada beberapa sebab yang mendorong militer secara aktif memasuki arena politik dan memainkan peranan politik. *Pertama*, karena adanya ketidakstabilan sistem politik. Keadaan seperti ini akan menyebabkan terbukanya kesempatan dan peluang yang sangat besar untuk menggunakan kekerasan dalam kehidupan politik; *kedua*, karena kemampuan golongan militer untuk mempengaruhi atmosfer kehidupan politik, bahkan memperoleh peranan-peranan politik yang menentukan. Yang menarik dalam kaitan ini adalah, dalam beberapa hal dominasi militer justru diundang dan dipermudah oleh golongan sipil. Ini biasanya terjadi sewaktu pemimpin sipil mengambil keputusan untuk memperbesar personil militer atau

²⁷ Harould Crouch, *Militer dan Politik Indonesia* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999), h. 389

²⁸ G. Dwipayana dan Ramadhan KH, *Otobiografi Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya* (Jakarta : Cipta Lantoro Agung Persada, 1989), h.460

meningkatkan persenjataan militer yang diperlukan untuk menghadapi musuh dari luar atau untuk mengatasi pergolakan politik dalam negeri; *ketiga*, karena *political perspective* kaum militer. Yaitu: mengenai peranan dan status mereka di dalam masyarakat dan juga berkenaan dengan persepsi mereka terhadap kepemimpinan kaum sipil dan terhadap sistem politik secara keseluruhan.²⁹

Keterlibatan militer dalam bidang sosial politik adalah akibat dari pertikaian partai-partai politik pada masa orde lama. Keterlibatan ini di dasarkan pada konsep dwifungsi yang secara tersirat dikenalkan oleh A.H. Nasution. Konsep dwifungsi dianggap sebagai jaminan dan rujukan oleh orde baru bahwa Indonesia akan tetap menjadi negara Pancasila dalam pengertian khusus. Doktrin ini telah di gunakan sebagai pembenaran bagi pengangkatan sejumlah besar anggota militer di MPR dan DPR, di jabatan-jabatan eksklusif tingkat nasional dan daerah serta di dalam perusahaan-perusahaan milik negara.³⁰

Fungsi sosial militer dalam bidang sosial politik semakin menampakan diri di orde baru, baik secara historis maupun konstitusional , fungsi militer dalam bidang sosial politik di jadikan sebagai kekuatan dan penopang kekuasaan oleh pemerintahan orde baru guna mempertahankan kekuasaannya tersebut. Fungsi militer di bidang politik era orde baru merupakan sejarah puncak keterlibatan militer dalam perpolitikan Indonesia.³¹ Dimana suasana negara Indonesia pada

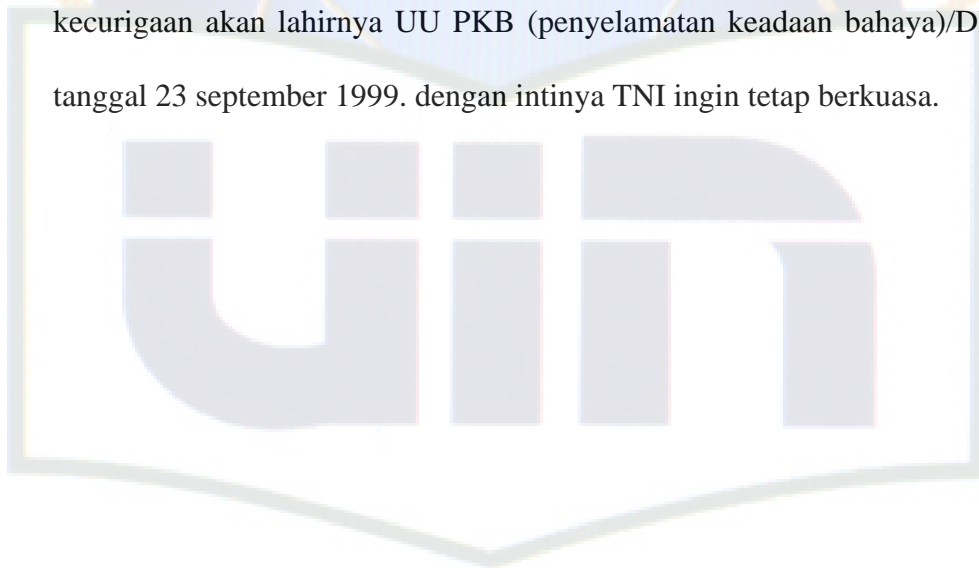
²⁹ Akhmad Zaini Abar (ed), *Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru:Esai-Esai dari Fisipol Bulak Sumur*, Kumpulan Makalah (t.d)

³⁰ R. William Liddle, *Pemilu-Pemilu Orde Baru Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Penerjemah Nung Katjasungkana, (Jakarta: LP3ES, 1992) h. 45

³¹ Eep Saipulloh Fatah, *Penghianatan Demokrasi Ala Orde Baru* (Bandung: PT. Remaja Karya Rosida Karya,2000) h. 38

masa reformasi tahun 1999 dalam konteks pandangan masyarakat terhadap TNI yang merupakan salah satu unsur penting militer antara lain :

1. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap TNI, karena pada masa reformasi TNI dianggap telah begitu banyak melakukan kejahatan-kejahatan yang diantaranya; aksi penculikan dalam setiap peristiwa, kekerasan-kekerasan yang dilakukan dalam rangka pengawalan pada perjalanan rezim orde baru, operasi DOM di Aceh, Papua, Timor-Timur dan wilayah lain yang ada di Indonesia.
2. Apriori dalam bentuk apapun yang dilakukan TNI dan kecenderungannya adalah dipandang negatif oleh masyarakat. Dengan alasan ; adanya kecurigaan akan lahirnya UU PKB (penyelamatan keadaan bahaya)/DPR tanggal 23 september 1999. dengan intinya TNI ingin tetap berkuasa.



BAB III

PROFIL PARTAI KOMUNIS INDONESIA

A. Sejarah Singkat Berdirinya PKI

1. Awal Gerakan Komunis

Ideologi Komunis masuk ke Indonesia pada tahun 1913, diperkenalkan oleh Endericus Josephus Franciscus Maria Sneevliet. Ia adalah mantan ketua Sekretariat Buruh Nasional dan mantan pimpinan Partai Revolusioner Sosialis di salah satu provinsi di negeri Belanda. Pada awalnya ia bekerja di Surabaya sebagai staff redaksi warta perdagangan *Soerabajasche Handdelsblad* milik sindikat perusahaan-perusahaan gula di Jawa Timur. Kemudian ia pindah ke Semarang sebagai sekretaris pada sebuah maskapai dagang.

Kota Semarang pada saat itu menjadi pusat Organisasi Buruh Kereta Api *Vereenigde Van Spoor En Tramweg Personeel* (Serikat Kereta Api dan Trem), yang telah berdiri sejak tahun 1908. Pada tahun 1914 VSTP propagandis-propagandis untuk menyebarkan faham yang dianut oleh organisasi buruh tersebut. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Sneevliet, ia diangkat sebagai propagandis bayaran. Melalui jalan ini sneevliet berkenalan dengan masa buruh dan menyebarkan ideologi pertentangan kelas.

Pada bulan Juli 1914, Sneevliet bersama dengan P. bersgma, J.A. brandstedder, HW. Dekker (sekretaris VSTP) mendirikan organisasi politik yang bersifat radikal yang bernama *Indisch Social Democratische Vereeniging* (ISDV) atau Serikat Sosial Demokrat India. Kemudian ISDV menerbitkan surat kabar

yang bernama *Het Vrije Woord* (Suara Kebebasan). Terbitan pertama surat kabar ini pada tanggal 10 Oktober 1915. melalui surat kabar inilah Sneevliet dan kawan-kawannya melakukan propaganda untuk menyebarkan Marxisme.¹

Karena anggota ISDV terbatas hanya pada kalangan orang-orang Belanda, maka organisasi ini belum dapat menjamah dan mempengaruhi organisasi pergerakan nasional seperti Boedi Oetomo, dan Serikat Islam (SI). Usaha ISDV untuk mendekati rakyat juga gagal, karena ISDV tidak mendapatkan dukungan dari rakyat. Dengan menggunakan organisasi buruh di Semarang ISDV mendekati Sarekat Islam yang dipimpin oleh Oemar Said Tjokroaminoto. SI adalah organisasi politik yang berlandaskan Nasional-Islam, yang berwatak anti kolonialisme dan kapitalisme dari para pengikut SI.

Pasca terjadinya revolusi di Rusia pada tahun 1917, watak gerakan ISDV semakin radikal dan jelas-jelas menjadi komunis. Pemimpin-pemimpin ISDV mendekati dan mempengaruhi pemimpin-pemimpin Sarekat Islam Semarang yang juga menjadi anggota VSTP dengan ide-ide revolusioner model Rusia. Di samping itu, pimpinan ISDV mengadakan propaganda di lingkungan angkatan perang. Sneevliet mempengaruhi serdadu Angkatan Darat dan Angkatan Laut, sedangkan pegawai negeri didekati oleh Baars dan Van Burink. Sneevliet melakukan berbagai aktivitas seperti melakukan caeramah-ceramah, kursus-kursus politik, atas hasutannya dia berhasil membentuk *Raad Van Matrozen* (Dewan Kelas Mariner), suatu organisasi di lingkungan anggota militer yang berhaluan radikal revolusioner.

¹ MABES ABRI, *Bahaya Laten Komunis di Indonesia, Perkembangan Gerakan dan Penghianatan Komunisme di Indonesia*, (Jakarta : Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1991), h. 5

Aktivitas Sneevliet ini dibantu sepenuhnya oleh Branstedder yang menjadi kepala dari Soerabajasche Marine Gebouw (Balai Angkatan Laut Surabaya) dan redaktur koran *Soldaten en Matrozenkrant* (Koran Serdadu dan Kelasi). Rata-rata isi Koran ini adalah ide-ide komunisme yang revolusioner dan ide-ide perjuangan kelas. Berbagai pamflet juga diterbitkan dengan tujuan untuk melemahkan kepercayaan bawahan kepada atasannya dalam tubuh Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Pemerintahan Hindia Belanda karena aktivitasnya dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban, kemudian menyusul brandstedder pada bulan September 1999.²

Meskipun Sneevliet dan Brandstedder telah meninggalkan Hindia Belanda, namun mereka berhasil menanamkan pengaruhnya dilingkungan Angkatan Laut Surabaya, setidaknya telah terbentuk organisasi yang berhaluan komunis. Di lingkungan Sarekat Islam, ISDV berhasil mempengaruhi pimpinan SI di Semarang, Samaun dan Darsono yang juga adalah anggota VSTP. Setelah berhasil memperoleh pancangan kaki pada tanggal 23 Mei 1920, di gedung Sarekat Islam Semarang, ISDV mengubah namanya menjadi Perserikatan Komunis De Indie (PKI) Samaun dipilih sebagai ketuanya dan Darsono sebagai wakil. Beberapa tokoh ISDV yang merupakan orang belanda asli diangkat sebagai pendamping antara lain bersama sebagai sekretaris, Dekker sebagai bendahara, dan A. Baars sebagai anggota. Organ (Media Massa) partai ditetapkan secara Ra'jat. Sekalipun Samaun dan Darsono telah menjadi pimpinan PKI, namun mereka tetap menjadi ketua Sarekat Islam Semarang, yang kebetulan memimpin Organ (Media Massa)

² Pringgodigjo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, (Jakarta : 1986), h. 24

SI, Sinar Hindia. Aktivitas SI Semarang dan PKI berjalan berdampingan. SI Semarang mendirikan sekolah SI, namun kepada murid-muridnya diajarkan lagu komunis internasional.

Propaganda tentang komunisme diintensifkan dengan cara menumpang pada pertemuan-pertemuan SI, aktivitas SI yang ditumpangi oleh PKI ini pada mulanya masih diperbolehkan oleh Central Serikat Islam (CSI) karena menurut anggaran dasar CSI, seorang anggota SI diperbolehkan menjadi anggota organisasi lain. Dengan kata lain, SI tidak melarang adanya keanggotaan rangkap. Adanya system keanggotaan rangkap ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh PKI untuk memecahbelah SI dari dalam. Memecah belah organisasi dari dalam organisasi itu sendiri, didalam dunia komunis disebut taktik aksi didalam (*Block Within*). Block didalam dilaksanakan dengan cara menginfiltrasikan kader atau anggota komunis untuk menjadi salah satu anggota organisasi yang menjadi sasarannya. Selanjutnya mereka beraksi mempengaruhi atau memecahbelah organisasi itu. Taktik “Block didalam” pertama kali dipraktekkan oleh PKI terhadap Sarekat Islam, yang pada saat itu merupakan organisasi pergerakan nasional yang besar dan kuat.

Sebenarnya, walaupun agak terlambat, SI sudah menyadari persaingan yang membahayakan dirinya. Hal ini dapat dilihat dari keputusan kongres SI pada bulan Oktober 1919 yang telah mengambil keputusan untuk menjadikan SI sebagai organisasi buruh dan tani. Tapi tindakan yang lebih kongkret diambil setelah berdirinya PKI, yakni dalam kongres ke-6 dimasa H. Agus Salim yang mengemukakan usul Abdul Muis untuk menegakkan disiplin partai. Dengan

demikian anggota SI, tidak boleh lagi merangkap anggota partai lain, terutama yang tidak oposisi pada konferensi itu kemudian dalam bulan Maret 1923 SI lalu mengadakan kongres darurat di Bandung dan di Sukabumi antara PKI dan SI merah, untuk mengambil langkah-langkah setelah pemisahan diri dari SI. Pada kongres yang diadakan oleh PKI dan SI-merah ini telah menghadirkan argument yang nyata yakni perkembangan PKI yang relative cepat dan ini dapat dilihat melalui jumlah peserta yang hadir cukup banyak. Kemajuan serta perkembangan cepat yang diperoleh telah melahirkan optimisme dalam diri pimpinan-pimpinan PKI. Pada kongres yang diselenggarakan oleh PKI dan SI-merah ini telah menempatkan SI-merah pada posisi menjadi Sarekat Rakyat (SR). di samping itu, Sarekat Rakyat dianggap pula sebagai wadah untuk menggodok calon-calon anggota PKI, sekaligus untuk mengembangkan suatu system baru dalam bentuk-bentuk organisasi massa (ormas) dalam gerakan komunisme di Indonesia.³

B. PKI Sebagai Instrumen Politik

1. Kepemimpinan PKI

Lapisan teratas dari kepemimpinan PKI dalam periode ini sebagian besar diduduki oleh para veteran pemberontakan tahun 1926-1927. Semaun termasuk salah satu arsitek pemberontakan tersebut dan muncul sebagai puncak penanggung jawab kegiatan PKI masa itu. Muhammad Yusuf, Soebardjo, juga merupakan mantan pemimpi PKI periode 1926-1927, demikian pula Darsomo dan Tan Malaka.

³ Arbi Sanit, *Badai Revolusi : Sebuah Sketsa Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), h. 42-43

Selain itu, lahir pula muka-muka baru dalam pergerakan PKI ini, yakni Setiadji, Abdul Madjid, Suripno, dan Maruto Darrusman yang muncul di kalangan pimpinan teratas PKI, setelah sebelumnya cukup berpengalaman dalam organisasi lain seperti Perhimpunan Indonesia. Dua posisi kunci yang muncul pada posisi kunci menjelang akhir periode ini adalah Aidit dan Nyoto. Aidit yang pada awalnya anggota CC PKI pada kongres ke-empat PKI, kemudian memegang kendali pada Departemen Propaganda dan Sekretaris Eksekutif FDR, sedangkan Nyoto mendapatkan posisi Kepala Seksi Informasi dalam Departemen Propaganda.

Pada masa itu gerakan bawah tanah relative subur dan berkembang, bahkan gerakan ini sempat mengeluarkan program 18 pasal pada tahun 1932.⁴ Tuntutan dari program program itu sangat mengutamakan kebebasan untuk berorganisasi yang tentu akan berkembang jika Indonesia bebas dari penjajahan. Tuntutan itu juga direncanakan dalam program yang bertujuan untuk memperbaiki upah buruh dan perbaikan-perbaikan kehidupan petani.

Dari luar negeri, usaha yang dilakuakn dalam mengorganisir kembali program maupun pergerakan PKI terus berjalan. Pada bulan April 1935, Muso ke Surabaya dan membentuk PKI bawah tanah (Ilegal-PKI), di samping itu Tan Malaka juga mengorganisir gerakan dibawah tanah. Akan tetapi, karena gerakan bawah tanah PKI ini sangat terbatas sebagai akibat karena sikap kewaspadaan PID dan pemerintah Kolonial Belanda., maka gerakan ini sangat terbatas pula pengaruhnya dalam masyarakat.

⁴ PKI, *40 Tahun PKI*, (Jakarta : Yayasan Embaruan, 1960), h. 33-35

2. Move PKI dibawah Muso

Sebagai partai PKI selalu menjalankan taktik bergerak dalam dua muka, yaitu legal dan illegal. Sebagai partai resmi, PKI berusaha menetralkan partai-partai yang tidak mau untuk diajak kompromi dan bekerjasama. Selain itu usaha yang dilakukan untuk memperbaiki pelbagai struktur maupun sistem organisasi yang ada serta membentuk organisasi baru dengan cara mengemukakan alasan-alasan kepentingan kelompok yang terorganisir yang berdasarkan pada ajaran-ajaran Marx dan Lenin,⁵ untuk selanjutnya PKI berusaha mempengaruhi dan mendominasi BTI, PESINDO yang didirikan oleh Yamin, GERINDO, Pemuda Indonesia, SOBSI pada tanggal 22 Agustus 1948. selain itu organisasi yang masih merupakan bentukan dan berada dalam pengaruh PKI adalah gabungan organisasi-organisasi di Surakarta yang dibentuk pada tanggal 26 Februari adalah Front Demokrasi Rakyat.

Siasat serta usaha PKI dalam mempengaruhi aparat Pemerintahan Desa ialah dengan cara memasukkan kader-kader PKI kedalamnya atau dengan cara mempengaruhi Pamong Desa melalui rapat-rapat, diskusi-diskusi, penerangan-penerangan, serta tulisan-tulisan yang bersifat propaganda. Jika diperhatikan lebih jauh, yaitu pada sumber-sumber inspirasi bagi seorang teoritikus dan politikus komunis, maka usaha-usaha organisasi front yang merupakan ciri khas dari bentuk-bentuk organisasi komunis adalah evaluasi dari teori-teori revolusi yang dihubungkan dengan kelas-kelas masyarakat.

⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 77-85

Dalam organisasi Front Demokrasi Rakyat, sebisa mungkin PKI berupaya menggabungkan organisasi yang ada didalam batas daerah partai komunis, dalam hal ini mereka berpandangan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah milik PKI. Mulai dari pelosok desa yang penduduknya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, maka golongan petani ini ditonjolkan dan digembori sebagai partner kaum buruh yang dianggap sebagai pemimpin revolusi social. Dapat terlihat dengan jelas, betapa FDR mampu menjangkau banyak organisasi-organisasi sampai pada tingkatan angkatan bersenjata. Muka lain dari gerakan komunis adalah gerakan dibawah tanah. Sebagai partai terlarang, ternyata gerakan bawah tanah ini merupakan taktik yang dinilai paling ampuh dalam memelihara *isme* komunis serta mobilitas untuk mempersiapkan diri untuk muncul kembali kepermukaan sosial maupun politik .⁶

3. Move PKI dibawah Aidit

Riwayat hidup Aidit memperlihatkan, bahwa ia merupakan seseorang yang berasal dari keluarga pekerja tapi Aidit mampu memperoleh kemajuan berkat keaktifannya dalam berorganisasi. Aidit lahir di Sumatera pada tanggal 30 Juli 1923 , dalam riwayat pendidikannya, Aidit pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Dagang Atas di Batavia. Namun, karena faktor ekonomi dan orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, ia terpaksa bekerja sebagai tukang jahit sambil melanjutkan sekolahnya. Organisasi yang pertama kali dijajaki oleh Aidit adalah Persatuan Timur Muda (PERTAMU), yaitu sebuah organisasi

⁶ Arbi Sanit, *Badai Revolusi : Sebuah Sketsa Politik*, h. 58-59

mahasiswa dan pemuda, PERTAMU bukanlah organisasi yang berhaluan komunis, akan tetapi didalamnya banyak dari golongan komunis.

Pada waktu Aidit bertemu dengan Amir Syarifudin, yang menurut pengakuannya sendiri sudah menganut paham komunis sejak tahun 1935, kemudian Aidit tertarik dengan uraian-uraian yang diberikan oleh Amir Syarifudin tentang komunisme. Dari uraian Amir Syarifudin inilah kemudian Aidit menjadi seorang pemimpin muda yang beraliran kiri di Jakarta. Seyogyanya pemimpin-pemimpin komunis, Aidit lebih mementingkan pekerjaan organisasinya untuk menumbuh-kembangkan ideology komunisme. Dalam menumbuh-kembangkan ideology komunisnya, Aidit lebih menekankan pada demokrasi rakyat, yang berarti para petani harus merdeka, memiliki tanah atau menyewa tanah dengan upah yang dikehendakinya. Ini bermakna, semua tanah yang dimiliki oleh tuan tanah asing maupun nasional harus disita tanpa penggantian kerugian. Jadi, menurut demokrasi rakyat yang ditekankan oleh Aidit ini dianggap lebih mengutamakan perlindungan golongan yang dianggapnya miskin melalui jalan yang ditentukannya sendiri.

Sedangkan tujuan dari demokrasi rakyat ini adalah masyarakat sosialis, yaitu masyarakat tanpa kelas. Jika sudah tercapai sosialisme yang dimaksud dengan paham demokrasi rakyatnya Aidit ini, maka kaum borjuis dari kalangan besar maupun kecil akan lenyap, karena waktu itu kekinginan untuk mencapai kekuasaan dalam tubuh kaum buruh dan tani begitu menggebu karena mereka beranggapan bahwa tingkatan sosial masyarakat pada dasarnya adalah sama. Yakni, tanpa adanya perbedaan kelas. Karena banyaknya kekuatan-kekuatan yang

mempunyai kepentingan sebelum tercapainya masyarakat sosialis dan kaum buruh maupun kaum tani belum mampu berdiri sendiri, maka PKI pun mengusahakan berlangsungnya proses demokrasi nasional. Sedangkan didalam demokrasi nasional ini, PKI bekerjasama dengan golongan-golongan lain yang bukan komunis dalam front nasional.

Jika melihat upaya maupun usaha PKI dalam menarik maupun mempengaruhi kalangan borjuis yang pada umumnya merupakan group penguasa, maka kesimpulan dari sikap PKI ini merupakan hasil dari sikap petani yang bereaksi secara pasif terhadap masalah-masalah politik. Golongan petani yang merupakan golongan orang biasa, eksistensinya tidak dapat diandalkan untuk menjadi pemimpin didesa-desa yang akan membantu PKI dalam mencapai keberhasilan untuk meraih kekuasaan dan mengepakkan sayap ideologi komunisnya lebih luas lagi ke pelosok nusantara.

Melalui Front Nasional yang merupakan organisasi gabungan bentukan PKI, untuk mencapai target maupun sasaran dalam rangka meraih kekuasaan, strategi yang digunakan oleh PKI adalah :

- a. Membentuk partai massa yang berdisiplin tinggi,
- b. Memobilisasi dan memimpin kelas-kelas yang penting dalam masyarakat yang dianggap paling revolusioner, yaitu partai buruh. Sedangkan golongan petani dan borjuis nasional merupakan kelas keempat dalam Front Nasional.
- c. Berusaha menarik toleransi dan respon kerjasama sebanyak mungkin dari elemen-elemen politik yang tidak anti komunisme secara terbuka.

Kebijaksanaan yang diambil oleh front nasional ini diambil berdasar pada pertimbangan praktis, seperti halnya kesulitan PKI yang dalam mengembangkan kader dipedesaan, karena petani yang dalam kondisi miskin tidak memiliki potensi untuk dijadikan kader, kemudian sebagai alternative PKI pun terpaksa mencari golongan petani yang kaya dan menengah. Walaupun dibarengi dengan kemungkinan-kemungkinannya, yaitu kelemahannya, seperti mengambil tindakan-tindakan yang menguntungkan diri sendiri. Disamping itu dapat pula mengharapkan bantuan dan sumbangan dalam bentuk materi dari golongan petani kaya dan menengah ini.⁷

4. Penguatan Partai

Dalam sudut pandang komunisme, demokrasi disebut sebagai sentralisasi demokrasi atau demokrasi terpusat. Sentralisasi demokrasi adalah prinsip yang menjamin bahwa mereka akan bergerak sebagai kesatuan yang terorganisir. Sedangkan sentralisme didasarkan pada kepemimpinan terpusat. Ini merupakan ciri terpenting bagi kaum sosialis-komunis bahwa peran Negara harus besar dan menonjol.⁸

PKI merupakan partai peserta perebutan kekuasaan yang diperhitungkan oleh Soekarno, ketika Presiden Soekarno memproklamirkan konsep demokrasi terpimpinnya. PKI adalah satu-satunya unsur terkuat yang mendukung konsep tersebut. Sikap PKI yang satu ini, dikarenakan PKI belum cukup kuat dalam menantang presiden, akan tetapi para pemimpin partai lain dan musuh-musuh

⁷ Arbi Sanit, *Badai Revolusi; Sebuah Sketsa Politik*, h. 67-69

⁸ Saiful Arif, *Ilusi Demokrasi*, (Jakarta : Desantara, 2003), h. 163-164

mereka menyadari fakta bahwa dengan seluruh cabang-cabangnya PKI mengontrol dukungan massa yang terbesar dan terorganisir rapi di tanah air.⁹

PKI menginsyati pentingnya partai dalam mengembangkan sayapnya, dengan menjalankan roda partai sehari-hari melalui *Comite Central*. Dan anggota dari *Comite Central* ini adalah pejabat-pejabat penting partai, pemimpin-pemimpin departemen dari *Comite Central*. Sedangkan selaku Polit Biro adalah penentu garis kebijaksanaan politik partai dan langsung bertanggungjawab kepada ketua *Comite Central*, yakni Aidit selaku sekretaris *Comite Central*. Untuk tugas-tugas khusus yang penuh dengan tugas rahasia dan penting dibentuklah Biro Khusus yang langsung bertanggungjawab kepada Ketua Partai. Tugas dari Biro Khusus antara lain; membina pejabat-pejabat penting pemerintah, anggota-anggota organisasi atau anggota-anggota partai non-komunis, warga Angkatan Bersenjata yang dianggap mau bekerjasama dengan PKI dan bertindak sebagai badan intelligent. Biro Khusus secara resmi dibentuk dalam tahun 1964 dengan ketua pertamanya Syam dan anggota Pono, Nyono, secara tidak resmi sebenarnya sudah beroperasi sejak tahun 1954.

Menurut Regional, organisasi dibawah *Comite Central* adalah Comite Daerah Besar (CDB), Comite Pulau Besar (CPB), Comite Jalan Raya (CDR) yang ketiganya setingkat. Di Indonesia kira-kira 21 organisasi tingkat kedua ini, kemudian menyusul Comite Seksi (CS, yang meliputi daerah Kabupaten dan Kota Besar), Comite Sub Seksi (CSS) melingkup Kecamatan atau Kota Kecil. Daerah yang terendah adalah Comite Ranting (CR) yang meliputi daerah suatu desa atau

⁹ Jeanne S. Mint, Muhammad, *Marx, Marhaen, Akar Sosialisme di Indonesia*, Terj. Zuhilmiyasari (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002), h. 283

bagian kota, suatu pabrik, kampung, kantor, sekolah-sekolah dengan sedikitnya 100 orang anggota.¹⁰



¹⁰ Arbi Sanit, *Badai Revolusi : Sebuah Sketsa Politik*, h. 72-75

BAB IV

PERAN SOEHARTO DALAM PERISTIWA G 30 S/PKI

A. Peristiwa Gestapu (Gerakan 30 September)

Dalam memetakan konstelasi politik Indonesia pasca tahun 55 setidaknya terbagi kepada dua bagian babak yang sangat significant, yakni babak dalam negeri dan Internasional (luar negeri). Peta tersebut sangat penting sehingga tergambar pola dan arah perpolitikan Indonesia sebelum memahami peristiwa yang dinamakan G 30S/PKI.

Dalam konteks nasional, Konstelasi politik pasca pemilu 1955 memang sangat menegangkan, terlebih banyak faksi yang kemudian memperlihatkan taring mereka. Dalam konteks ini sebagai salah satu pemenang pemilu PKI turut memberikan pengaruh yang sangat signifikan, mengingat kedekatan PKI dan Soekarno.

Pemberontakan PRRI dan PERMESTA menjadi salah satu akhir keberadaan partai Islam yang paling besar yakni Masyumi, dimana mayoritas anggota Masyumi ikut dalam pergerakan PRRI dan Permesta, sehingga presiden Soekarno membubarkan Masyumi dan memenjarakan pengikut Masyumi yang ikut terlibat.

Akumulasi dari pemberontakan PRRI dan PERMESTA adalah ideologi NASAKOM yang sangat dibanggakan oleh Soekarno, yakni Nasionalis yang diwakili oleh PNI, Agama yang diwakili oleh NU, dan Komunis yang diwakili oleh PKI.

Dalam konstelasi politik Internasional, Soekarno berani mengambil kebijakan-kebijakan yang yang radikal, diantaranya keluar dari PBB dengan alasan enggan menerima Malaysia dalam PBB karena dianggapnya negara Malaysia merupakan negara Boneka Inggris.¹ Yang lebih radikal Soekarno berani menarik aset-aset nasional, dengan menentang imperialisme dan anti Barat, dengan slogan yang kemudian dikenal dengan Berdikari (berdiri di atas kaki sendiri).

Keadaan tersebut sontak membuat ketegangan antara Indonesia dengan Barat (Amerika dan sekutunya). Keadaan ini dimanfaatkan oleh RRC dengan menggandeng dan mendukung Soekarno dalam setiap kegiatannya karena Soekarno dinilai paling berani menentang Barat.

Tahun-tahun menjelang peristiwa G 30S/PKI suasana memanas antara Soekarno yang makin erat dengan PKI dan Angkatan Darat yang tidak setuju keberadaan PKI hal ini diwakili oleh Nasution, bahkan pada bulan Juni 1962 Sukarno sukses menyingkirkan Nasution dari posisi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk selanjutnya hanya menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KSAB) yang sama sekali tidak berwenang atas komando.²

Posisi Nasution digantikan oleh Jenderal Ahmad Yani. Awalnya Soekarno menganggap bahwa Yani dapat diatur, tetapi anggapan tersebut keliru, Yani lebih mengikuti garis Angkatan Darat yang anti komunis.³

¹ Rosihan Anwar, *Sukarno, Tentara, PKI; Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961-1965* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1980), h. 335

² Salim Said, "Dari Permainan Segi Tiga Ke Sebuah Prahara" dalam Rosihan Anwar, *Sukarno, Tentara, PKI; Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961-1965* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1980), h. xi

³ *Ibid.*, h. xi

Ketika Soebandrio bertandang ke RRT (Republik Rakyat Tiongkok) tahun 1963 untuk urusan kenegaraan, Indonesia ditawari oleh pemerintahan Cina bantuan persenjataan untuk 40 batalion, namun pernyataan tersebut tidak langsung disetujui oleh Soebandrio, mengingat bukan kapasitas dia untuk memberikan jawaban atas bantuan tersebut. Maka setelah kembalinya dari China Soebandrio menyampaikan perihal bantuan China tersebut kepada Soekarno. Dan Soekarno menyetujuinya namun belum memberikan tanggapan kapan persenjataan tersebut akan dikirim.⁴

Bantuan senjata tersebut adalah awal embrio dari angkatan ke-lima dalam militer Indonesia yang di canangkan Soekarno, namun Soekarno belum merincikan format angkatan ke-lima tersebut. Isu tersebut sampai kepada PKI, kemudian CC. PKI. DN. Aidit menemui Soekarno untuk membicarakan angkatan ke-lima, yakni dengan mempersenjatai petani dan buruh sebagai angkatan ke-lima. Pernyataan Aidit tersebut tidak langsung mendapat restu dari Soekarno.

Inilah masalah yang kemudian berlarut-larut antara Soekarno dengan Angkatan Darat. Menpangad Letjen A. Yani sudah menyatakan langsung kepada presiden bahwa tidak setuju dengan angkatan kelima. Para jenderal lainnya mendukung sikap Yani. Bagi Yani empat angkatan bersenjata sudah lebih dari cukup.⁵

⁴ Soebandrio, *Peristiwa G 30 S (Sebelum, saat meletus dan sesudahnya)*. (Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2006), h. 13-14

⁵ *Ibid.*, 16

Inilah kemudian yang menyebabkan terjadinya faksi politik yang kian memanas dalam tubuh pemerintahan Indonesia. Menurut Soebandrio terdapat tiga unsur kekuatan yang mendominasi politik Indonesia yakni :⁶

1. Unsur kekuatan Presiden RI
2. Unsur kekuatan TNI AD
3. Unsur kekuatan PKI (PARTAI Komunis Indonesia).
4. Unsur kekuatan Soeharto (poin ini ditambahkan oleh penulis)

Pertama, unsur kekuatan Soekarno adalah orang-orang yang loyal kepada Soekarno yakni Kabinet Dwikora. *Kedua*, Unsur TNI AD unsur ini terdiri dari para Jenderal Angkatan Darat minus Soeharto. Para jenderal tersebut secara ideologis sangat menentang kebijakan Soekarno mengenai PKI. *Ketiga*, PKI, kekuatan PKI pada saat itu berjumlah 17 juta anggota. Di tambah underbouw PKI seperti BTI, Sobsi, Gerwani. Pemimpin mereka yakni DN. Aidit berhasil masuk dalam jajaran pemerintahan yakni sebagai Ketua MPRS, dan berhasil memasukan beberapa anggotanya seperti Lukman sebagai Menteri Wakil Ketua DPRGR, dan Nyoto Menteri Negara. Dan *Keempat*, Unsur kekuatan Soeharto yang bergerak di bawah tanah menghimpun dan menyusun kekuatan namun jarang nampak kepermukaan. Soeharto dengan Kostradnya menarik diri dari kekuatan Jenderal AD yang bersebrangan dengan Soekarno, yang kemudian menyusun kekuatan dengan merekrut beberapa kolega dia dulu di Divisi Dipenogoro seperti Yoga Soegama dan Ali Moertopo.

⁶ *Ibid.*, 3

Isu yang kemudian berkembang di kalangan istana negara adalah adanya sebuah koalisi jenderal yang dinamakan dewan jenderal yang akan melakukan kudeta politik kepada Soekarno. Isu tersebut ditanggapi serius oleh para pengikut Soekarno dengan melakukan serangkaian rapat dan penelitian mengenai kebenaran isu tersebut.

Terlepas dari adanya keterkaitan ataupun tidak dengan PKI aktor yang mendalangi penculikan para Jenderal Angkatan darat adalah Kolonel Untung, dari Cakrabirawa (pengawal khusus presiden), Brigjend Supardjo, Letnan Kolonel Udara Heru, Kolonel Laut Sunardi dan AKBP Anwas.⁷

Perbedaan mendasar kemudian tercermin dari cara mengungkapkan masalah, hal ini terkait dengan setting pelaku. Menurut Antonie C.A. Dake Menjelang akhir Agustus 1965 pimpinan Biro Khusus PKI Syam Kamaruzzaman, Supomo, dan Waluyo terus menerus mengadakan pertemuan yang hasil-hasilnya selalu dilaporkan kepada ketua CC. PKI D.N. Aidit.

Sejak 6 September 1965 pertemuan ditingkatkan menjadi rapat-rapat rahasia dengan oknum-oknum ABRI yang telah lama dibina. Dalam kaitan ini, Syam Kamaruzzaman melontarkan isue adanya Dewan Jenderal yang hendak melakukan perebutan kekuasaan terhadap pemerintahan Soekarno.

Pada rapat tanggal 22 September 1965, PKI mulai membagi tiga pasukan yang harus melakukan tugas-tugas yang berbeda, yaitu :

1. Pasukan Pasopati yang bertugas untuk menculik dan membunuh Jenderal Angkatan Darat,

⁷ Anwar, *Sukarno, Tentara, PKI*, h. 377

2. Pasukan Bimasakti yang bertugas untuk menguasai RRI dan Telekomunikasi,

3. Pasukan Gatotkaca yang bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan di Lubang Buaya.⁸

Secara fisik gerakan militer kubu PKI dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung yang merupakan Komandan Batalion I Resimen Cakrabirawa, selaku pimpinan formal seluruh gerakan. Mereka (dalam hal ini PKI) bergerak pada dini hari tepatnya pada tanggal 30 september menjelang 1 Oktober 1965 dini hari, dan mengawali pergerakannya dengan melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap enam perwira tinggi dan seorang perwira pertama.⁹ Diantara perwira tersebut adalah : Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani, Mayjen TNI R. Suprpto, Mayjen TNI M.T. Haryono, Mayjen TNI Siswondo Parman, Brigjen TNI DI Panjaitan, Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo, Lettu Pierre Tendean yang merupakan Ajudan Jenderal A.H. Nasutionpun ikut tewas dalam tragedi ini, seharusnya yang menjadi target utama penculikan dan pembunuhan tersebut adalah Jenderal TNI A.H. Nasution.

Terkait dengan penculikan para jenderal AD tersebut, Untung dan beberapa petinggi “Gerakan 30 September” menggunakan dua battalioan yakni 454 dan 530, yang keduanya merupakan pasukan elit Kostrad yang berada di bawah Soeharto. Baik C.A Dake maupun keterangan dari Soebandrio dalam bukunya *Peristiwa G 30 S* menyatakan bahwa dua battalioan tersebut merupakan anak buah Soeharto. Hal ini mengindikasikan terdapatnya keterkaitan baik secara langsung

⁸ Antonio C.A Dake, *Soekarno File: Kronologi Suatu Keruntuhan*. Penerjemah Loek Pattiradjawane, (Jakarta: Aksara Karunia, 2006), h.

⁹ *Ibid*

maupun tidak antara Soeharto dengan gerakan 30 September. Hal ini ditegaskan oleh Soebandrio dengan membeberkan latarbelakangpasukan yang menculik para jenderal tersebut. Untung dan Latief merupakan bawahan Soeharto ketika di divisi Diponegoro Semarang. Dan Syam Kamaruzzaman merupakan anak buah Soeharto dalam perang Patuk Jogja.¹⁰

Seperti dijelaskan oleh Yoseph Tugio Taher,¹¹ Kendatipun ada orang yang mungkin mengatakan bahwa Soeharto bukanlah otak atau perencana G30S, namun faktanya, dia menyetujui apa yang bakal dilakukan oleh Letkol. Untung bahkan memberi bantuan militer dengan pemanggilan Batalyon 530 dari Jatim dan Batalyon 454 dari Jateng. "*Dalam waktu secepatnya akan saya datangkan pasukan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah*" kata Soeharto kepada Letkol. Untung. (kepada Letkol. Untung, Mayjen Soeharto tidak memngungkapkan bahwa dia juga akan memanggil Yon 328/RPKAD Siliwangi-pen).

Pernyataan senada diungkapkan oleh Doktor Peter Dale Scott melihat banyak keanehan dalam peristiwa G30S, di mana dua pertiga dari kekuatan satu brigade pasukan para komando, ditambah satu kompi dan satu peleton pasukan lainnya yang merupakan kekuatan keseluruhan G30S, sehari sebelum kejadian diinspeksi oleh Mayjen Soeharto.¹²

Banyak sejarawan kemudian menyangsikan PKI di balik G30S, termasuk para ahli sejarah. Mereka menuduh TNI AD dengan tokohnya, Soeharto adalah

¹⁰ Soebandrio, *Peristiwa G 30 S*, h, 31-40

¹¹ Yoseph Tugio Taher, *G30S dan Soeharto*. Artikel diakses pada 25 Mei 2010 dari <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=8&dn=20080928163306>

¹² Maruli Tobing, "Bung Karno, Perjalanan Pnjang Menuju G30S" dalam St. sularto (Ed), *Dialog dengan Sejarah; Soekarno Seratus Tahun*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), h. 290

dalang G30S mereka mendasarkan teori pada fakta laporan Kolonel Latief kepada Soeharto (29/9/1965 malam) tentang rencana penjemputan paksa para jenderal.¹³

Akan tetapi ada pernyataan menarik dari Soeharto dalam biografinya yang ditulis oleh R.E Elson, Soeharto menegaskan :

” pergerakan itu bukanlah pergerakan yang muncul tiba-tiba pada 30 september, tapi merupakan akumulasi dari rangkaian kejadian yang telah dipersiapkan sejak lama. Suasana penuh hasutan dan fitnah, yang membangkitkan perasaan saling curiga antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, serta iklim ekonomi yang buruk, yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, dengan mudah digunakan oleh mereka untuk kemudian melakukan gerakan kontrrevolusi.... Dalam setiap sandiwara selalu ada pemain utama, pembantu dan dalangnya. Hal yang sama juga dimiliki oleh gerakan kontrarevolusi, yang menamakan dirinya gerakan 30 September. Selalu ada aktor utama, ada juga peran pembantu dan juga dalangnya, yaitu kelompok dalam yang terlibat. Aktor utama , yang mengatur kelompok lainnya, didalangi oleh kelompok Untung dan beberapa anggota ABRI. Sedangkan peran pembantu dijalankan oleh para Pemuda Rakyat, Gerwani. Dalangnya, menurut fakta dan dokumen-dokumen serta hasil interogasi yang kami dapat menunjuk adanya peran PKI sebagai otak gerakan kontrarevolusi.”¹⁴

¹³ Salahudin Wahid, “Bagaimana Melihat 40 Tahun Peristiwa G30S Berlalu” dalam Bagus Darmawan (ed), *Warisan (daripada) Soeharto*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2008), h. 57

¹⁴ R.E. Elson, *Suharto; Sebuah Biografi Politik* (Jakarta: Pustaka Minda Utama, 2005) h. 242-243

Namun proses untuk membuktikan kesangsian tersebut terhalang tembok kekuatan besar Orde-Baru selama 32 tahun yang berhasil membungkam setiap pernyataan yang bersebrangan dengan pemerintahan Soeharto.

Terlepas dari siapa yang bertanggungjawab atas permasalahan Gestapu, inti dari serangan gestapu tersebut terbagi kepada dua bagian yakni: *pertama*, “penyingkiran” petinggi Angkatan Darat yang kemudian diterjemahkan dengan pembunuhan para jenderal tersebut. Tuduhan yang kemudian dialamatkan kepada para jenderal yang dibunuh adalah terbentuknya dewan jenderal yang akan mengukudeta kepemimpinan Soekarno, setelah beredar desas-desus mengenai memburuknya kesehatan Soekarno. *Kedua*, Pemberangusan Partai Komunis Indonesia yang dipersalahkan atas serangan 30 september tersebut.

B. Soeharto dan Penumpasan G 30 S/PKI

1. Biografi Singkat Soeharto

Soeharto lahir di Kemusuk, Yogyakarta, tanggal 8 Juni 1921. Bapaknya bernama Kertosudiro seorang petani yang juga sebagai pembantu lurah dalam pengairan sawah desa, sedangkan ibunya bernama Sukirah.

Soeharto masuk sekolah ketika berusia delapan tahun, tetapi sering pindah. semula disekolahkan disekolah desa (SD) Puluhan, Godean. Lalu pindah ke SD Pedes, karena sering berpindah-pindah sekolah akhirnya Soeharto dititipkan ayahnya di rumah adik perempuannya yang menikah dengan Prawirowihardjo, seorang mantri tani.¹⁵

¹⁵ Andreas Maryoto, “Pendidikan dimulai di Wuryantoro” dalam Bagus Darmawan (Ed), *Warisan (daripada) Soeharto*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008) h, 4

Setelah menamatkan pendidikan dasarnya Soeharto masuk dalam keprajuritan, sampai akhirnya terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong, Jawa Tengah pada tahun 1941. Beliau resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945. Pada tahun 1947, Soeharto menikah dengan Siti Hartinah seorang anak pegawai Mangkunegaran.

Perkawinan Soeharto dengan Siti Hartinah dilaksanakan tanggal 26 Desember 1947 di Solo. Dan mereka dikaruniai enam putra dan putrid: Siti Hardiyanti Hastuti, Sigit Hardjojudanto, Bambang Trihatmojo, Siti Hediati Herijadi, Hitomo Mandala Putra dan Siti Hutami Endang Adiningsih.¹⁶

Dalam Militer Soeharto pernah bergabung dalam Koninklijk Negerlandsch Indische Leger (KNIL), setelah Belanda menyerah kepada Jepang Soeharto bergabung dengan Pembela Tanah Air (PETA). Ketika Jepang kalah dan Peta dibubarkan, Soeharto bergabung dengan kaum pergerakan Yogyakarta di bawah kepemimpinan aktivis Yogyakarta Dayno yang lebih dikenal sebagai kelompok Pathuk di Yogyakarta dan setelah itu Soeharto masuk menjadi anggota tentara RI.¹⁷

Seperti yang disimpulkan oleh Robert Elson, sikap, pilihan, dan keputusan Soeharto menggambarkan tabiatnya yang tetap dipertahankan kelak, yaitu:

“Penting sikap berjaga-jaga ketika taruhan tinggi dan titik-titik persilangan pendapat tidak jelas, hanya memberikan komitmen ketika pihak yang menang menjadi jelas, keharusan memperliat urat saraf di bawah tekanan, kegunaan tetap

¹⁶ “Biografi Soeharto” Artikel diakses pada 25 mei 2010 dari <http://www.wattpad.com/79641-biografi-soeharto>

¹⁷ “Biografi Soeharto” diakses tanggal 25 Mei 2010 dari <http://eh.web.id/biografi-mantan-presiden-soeharto/> atau link download http://downloads.ziddu.com/downloadfile/633568/U_BIOGRAFI_PAK_SOEHARTO.zip.html

mempertahankan kepercayaan dan perhatian (favor) dari dua kekuatan bertikai sampai saat paling akhir. Memang persis, sifat-sifat yang menjadi suatu yang khas dirinya kelak dikemudian hari sudah mulai tampak: kehati-hatian, dingi, ketegasan mengambil keputusan dengan penuh perhitungan ketika tiba saatnya.¹⁸

Kedua, adalah serangan Umum Satu Maret 1949 adalah meningkatnya citra Soeharto yang berhasil menumpas Belanda dari Yogyakarta hanya dengan enam jam. Dan terakhir peran sentral Soeharto dalam penumpasan G30S/PKI tahun 1966 dan keberhasilannya menggantikan Soekarno, hingga menjadi Presiden RI ke-2.

2. Penumpasan PKI oleh Soeharto

Drama panjang G30S/PKI memang sangat ruwet dan banyak versi yang kemudian berkembang di Masyarakat, terutama setelah kejatuhan rezim Soeharto selama 32 tahun berkuasa membuat scenario mengenai G30S/PKI menurut persi pemerintah Orde Baru, bahkan sampai kepada pembuatan film yang terus diputar tiap 30 September yang berjudul Penghianatan G30S/PKI.

Indikasinya jelas bahwa yang bertanggungjawab atas semua masalah yang berkecamuk pada tahun 1965 adalah PKI. Dan yang bertanggungjawab atas masalah tersebut juga adalah PKI.

Namun pasca Reformasi, pembungkaman terhadap informasi mulai terbuka, dengan banyaknya persi atau orang yang mengeluarkan pendapat

¹⁸ “Biografi Soeharto” diakses tanggal 25 Mei 2010 dari <http://eh.web.id/biografi-mantan-presiden-soeharto/> atau [link](http://downloads.ziddu.com/downloadfile/633568/U_BIOGRAFI_PAK_SOEHARTO.zip.html) download http://downloads.ziddu.com/downloadfile/633568/U_BIOGRAFI_PAK_SOEHARTO.zip.html

diantaranya Soebandrio yang pada pemerintahan Soekarno menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri I/Menteri Luar Negeri/ Kepala Badan Pusat Intelejen.¹⁹

Tanggal 1 Oktober 1965 merupakan *turning point* (titik balik) dalam perjalanan hidup Presiden Soekarno. Mulai tanggal 1 Oktober, Presiden Soekarno bukan lagi merupakan satu-satunya pemimpin tertinggi di Indonesia. Pada Hari yang sama, Panglima Kostrad Mayjen Soeharto mulai membangun kekuatan tandingan dengan secara sepihak mengambil alih pimpinan Angkatan Darat dari tangan Menteri/Panglima Angkatan darat Jenderal Ahmad Yani, yang belum diketahui keberadannya.²⁰

Dengan kekuasaannya Soeharto mencegah Panglima Kodam V Jaya Brigadir Jenderal (Brigjen) Umar Wirahadikusumah memenuhi panggilan Presiden Soekarno untuk menghadap. Soeharto menyampaikan amanat kepada Komisariss Besar Polisi Sumirat dan Kolonel (Mar) Bambang Widjanarko, ajudan Presiden Soekarno dengan pernyataan "*sampaikan kepada Bapak Presiden, mohon maaf Panglima Kodam V Jaya tidak dapat menghadap. Dan karena saat ini Panglima Angkatan Darat tidak di tempat, harap semua instruksi untuk Angkatan Darat disampaikan melalui saya, Panglima Kostrad.*"²¹

Cara-cara yang diterapkan oleh Soeharto sangat efektif, seperti mensatu corongkan pusat informasi hanya pada Kostrad. Melalui panglima Kodam V Jaya Brigjen Umar Wirahadikusumah, Soeharto melarang terbit semua surat kabar, di luar surat kabar milik Angkatan Darat. *Kompas* termasuk surat kabar yang tidak

¹⁹ Soebandrio, *Peristiwa G 30 S*, h, 121

²⁰ James Luhulima "Peristiwa G30S, 'Titik Balik' Soekarno" dalam St. Sularto (Ed), *Dialog dengan Sejarah; Soekarno Seratus Tahun*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), h. 295

²¹ *Ibid.*, h, 295-296

diizinkan terbit. Mulai tanggal 2-5 Oktober 1965 media cetak yang terbit hanya *Harian Angkatan Bersenjata, Berita Yudha, Kantor berita Antara, dan Pemberita Angkatan Bersenjata*.²²

Pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 21.00, melalui *RRI* Mayjen Soeharto mengumumkan bahwa dirinya telah mengambil alih pimpinan Angkatan darat. Padahal pada saat itu, ia sudah mengetahui bahwa Presiden Soekarno telah mengambil alih pimpinan Angkatan Darat dan mengangkat mayjen Pranoto Reksosamudro sebagai *caretaker*. Atas pemberitaannya di *RRI*, Soeharto dipanggil oleh Soekarno untuk mempertanggungjawabkan pemberitaan tersebut. Soeharto berdalih bahwa pengambil alihan kekuasaan Angkatan darat dilakukannya agar AD tidak terjadi kekosongan, dan untuk masalah Pranoto Reksosamudro, Soeharto mengancam bahwa jika terjadi dualism kepemimpinan di tubuh AD akan terjadi kekacauan mengingat dirinya telah menguasai AD.²³

Mengingat Mayjen Soeharto secara *de facto* sudah “mengendalikan” pasukan, maka Presiden Soekarno mengangkatnya menjadi Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib). Dengan wewenangnya sebagai Pangkopkamtib, Soeharto “membersihkan” Angkatan Darat dari orang-orang yang dianggap terlibat G30S. bahkan Mayjen Pranoto Reksosamudro, pada tanggal 14 Oktober 1965, ditangkap dengan tuduhan terlibat G30S. Dengan demikian, Presiden Soekarno tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengangkat Soeharto jadi Menteri/Panglima Angkatan Darat.²⁴

²² *Ibid.*, h, 306

²³ *Ibid.*, h, 307

²⁴ *Ibid.*, h, 307-308

Memang segala setingan akhir dari penumpasan G 30 S/PKI yang dilakukan oleh Soeharto dan kroninya menjurus pada satu target sasaran yakni penumpasan PKI.

Berikut skema Penumpasan G 30 S/PKI dari Aspek Militer :²⁵

Untuk menumpas Kekuatan PKI, pemerintah melancarkan operasi militer, setelah berhasil menghimpun pasukan lain termasuk divisi Siliwangi dan Kavaleri, Resimen Para Komando Angkatan darat (RPKSD) yang dipimpin Sarwo Edhie Wibowo, Panglima Kostrad, mulai memimpin operasi penumpasan.

1. Pada tanggal 1 Oktober 1965, beberapa tempat penting seperti RRI dan Telkom telah dapat diambil alih oleh pasukan RPKAD tanpa pertumpahan darah.
2. Pada hari yang sama, Mayjen Soeharto mengumumkan beberapa hal penting berikut melalui RRI.
 1. Penumpasan G30S/PKI oleh angkatan Militer.
 2. Dewan Revolusi Indonesia telah demisioner.
 3. Menganjurkan kepada rakyat agar tetap tenang dan waspada.
3. Pada tanggal 3 Oktober 1965 pasukan RPKAD berhasil menguasai kembali Bandara halim Perdanakusuma.
4. Pada tanggal 3 Oktober 1965, atas petunjuk anggota polisi bernama Sukitman berhasil ditemukan sumur tua yang digunakan untuk mengubur jenazah para perwira Ad.

²⁵ “Tragedi Nasional Peristiwa Madiun PKI, DI/TII, G 30 S/PKI, Dan Konflik-konflik Internal lainnya.” Artikel diakses pada 25 mei 2010 dari [http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Tragedi_Nasional_Peristiwa_Madiun_PKI,_DI/TII,_G_30_S/PKI,_Dan_Konflik-konflik_Internal_Lainnya_9.2_\(BAB_12\)](http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Tragedi_Nasional_Peristiwa_Madiun_PKI,_DI/TII,_G_30_S/PKI,_Dan_Konflik-konflik_Internal_Lainnya_9.2_(BAB_12))

5. Pada tanggal 5 Oktober 1965, jenazah para Jenderal AD dimakamkan dan mendapat penghargaan sebagai Pahlawan Revolusi.

Untuk menumpas G 30 S/PKI di Jawa Tengah, diadakan operasi militer yang dipimpin oleh Pangdam VII, Brigadir Suryo Sumpeno. Penumpasan di Jawa Tengah memakan waktu yang lama karena daerah ini merupakan basis PKI yang cukup kuat dan sulit mengidentifikasi antara lawan dan kawan. Untuk mengikis sisa-sisa G 30 S/PKI di beberapa daerah dilakukan operasi militer berikut.

- a. Operasi Merapi di Jawa Tengah oleh RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhie Wibowo.
- b. Operasi Trisula di Blitar Selatan dipimpin oleh Kolonel Muh. Yasin dan Kolonel Wetermin.

Akhirnya dengan berbadai operasi militer, pimpinan PKI D.N. Aidit dapat ditembak mati di Boyolali dan Letkol Untung Sutopo ditangkap di Tegal.

Pasca kejadian G30S/PKI dimana para jenderal dibunuh di Jakarta, justru pergolakan sosial baru terjadi sekitar tanggal 20-21 Oktober, ditandai dengan pembunuhan massal yang berlangsung di Jawa Tengah, khususnya daerah Boyolali dan Klaten. Pembunuhan massal yang mengatasnamakan pemberantasan G30S/PKI terjadi secara bergelombang, Pada bulan Oktober pembunuhan terjadi di Jawa Tengah, selanjutnya bulan November di Jawa Timur, dan baru bulan Desember di Bali.²⁶

Di Jakarta, berdasarkan petunjuk Ali Moertopo, Soeharto mengkampanyekan propaganda anti PKI. Peopaganda ini ditujukan baik kepada

²⁶ Bskara T. Wardaya, SJ "Tentang Tragedi 1965" dalam Bagus Darmawan (ed), *Warisan (daripada) Soeharto*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2008), h. 52

masyarakat dalam maupun luar negeri. Gerakan 30 September yang dinamakan “Gestapu” menjadi sebuah tonggak bagi dimulainya aksi legitimasi bagi Soeharto dan para pendukungnya untuk memberitakan bahwa telah terjadi penyiksaan sadis dan mutilasi termasuk pengibirian seksualitas yang menurut laporan dilakukan oleh anggota Gerakan Wanita (Gerwani) PKI.²⁷

Sejumlah pengamat mengungkapkan bahwa Amerika Serikat memberi dukungan kuat kepada Soeharto pada saat genting ini. Marshall Green lebih lanjut mengatakan bahwa “ peristiwa 1 Oktober 1965 merupakan kejutan besar bagi kami,” sebuah pengakuan bahwa “Amerika Serikat mendukung dan mendapat banyak manfaat dari momen perubahan ini.” Tapi, ia menegaskan, “tidak ada campur tangan AS dalam hal ini. Ini murni hasil usaha Indonesia. Meskipun demikian, kebijakan AS untuk mendukung secara diam-diam telah membantu kepemimpinan baru di Indonesia ketika kepemimpinan baru itu mulai membangun kembali Negara yang selama bertahun-tahun terbelakang akibat ambisi Soekarno yang sewenang-wenang.”²⁸

C. Soeharto, Militer dan Supersemar

Pelaku utama terbitnya Surat Perintah 11 maret 1966 berjumlah Sembilan orang, yaitu Bung Karno, Soebandrio, Chaerul Saleh, Leimena, Sabur, Soeharto, dan “trio utusan Soeharto”, yaitu M Jusuf, Amirmachmud, serta Basoeki Rahmat. Pelaku kubu Soekarno tidak pernah memberi kesaksian, Karena sejak awal mulut

²⁷ R.E. Elson, *Suharto; Sebuah Bigrafi Politik* (Jakarta: Pustaka Minda Utama, 2005) h. 239

²⁸ *Ibid.*, h. 244

mereka di tutup rapat-rapat. Dari kubu Soeharto terdapat Basoeki telah meninggal dunia, tinggal tersisa tiga orang yaitu : Amir, Jusuf dan Soeharto, namun dari mulut ketiganya sering terlontar kesaksian yang bertentangan.²⁹

Sekembalinya dari Istana Bogor ketiga utusan Soeharto langsung menghadap Soeharto. Sebagai Panglima Angkatan Darat, lewat Supersemar Bung karno memberi Soeharto tugas, "...mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan pemerintahan dan revolusi."³⁰

Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah seberapa banyak jumlah tindasan (pengandaan) Supersemar dilakukan? Atmadji melukiskan, Jusuf mempunyai dua versi yang secara substansial berbeda jauh. Pada awalnya Jusuf menyatakan bahwa naskah Supersemar hanya satu kopi, diketik oleh Komandan Tjakrabirawa Brigjen Sabur. Namun pernyataan tersebutpun akhirnya kabur mengingat pada kesempatan Lain Jusuf mengatakan kepada Jusuf Kalla (mantan Wapres) bahwa surat tersebut dibuat tiga rangkap satu untuk ditandatangani Soekarno, yang kemudian diberikan kepada Soeharto, tindasan kedua ditangan Sabur dan ketiga ditangan Jusuf.³¹

Dampak langsung setelah keluarnya Supersemar adalah terjadinya ketegangan umum yang menyelimuti ibu kota. Beredar luas tentang pertikaian antara Angkatan Darat dan Angkatan Udara. Tanggal 12 Maret, Sarwo Edhie memimpin pasukannya dalam parade kemenangan spontan, sekalipun ada bahaya,

²⁹ Tjipta Lesmana "Supersemar dan Kisah Tak Tertutur" dalam Bagus Darmawan (ed), *Warisan (daripada) Soeharto*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2008), h. 48

³⁰ Bagus Darmawan (ed), *Warisan (daripada) Soeharto*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2008), h. 60

³¹ *Ibid.*, h. 61

melalui jalan-jalan di Jakarta dan disambut sangat antusias oleh warga masyarakat. Tentara, barangkali atas dorongan Soeharto dengan garang menyerbu kantor pusat BPI (Biro Pusat Intelijen) yang diketuai oleh Soebandrio di Menteng, dan merampas banyak sekali dokumen.

Memang saat itu terjadi perdebatan panas mengenai sifat dan cakupan kekuasaan yang dilimpahkan kepada Soeharto melalui Supersemar . akan tetapi Soeharto menangkis dengan mengatakan bahwa surat itu dikeluarkan pada saat negara dalam keadaan genting, di mana integritas Presiden, ABRI dan rakyat sedang berada dalam bahaya, sedangkan keamanan, ketertiban dan pemerintahan dalam keadaan amburadul. Memang kekuatan Supersemar secara fundamental bertambah karena cara dan gaya Soeharto dalam menjalankannya. Tindakan Soeharto melarang PKI (yang berseberangan dengan keinginan Soekarno) dengan mengatasnamakan kekuasaan barunya mampu memecahkan kebuntuan politik dan membuang retorika revolusioner yang pernah mendominasi wacana politik di masa-masa kejayaan Soekarno. Puncaknya adalah tanggal 18 Maret ketika Soeharto menahan 15 anggota kabiner Dwikora yang telah direformasi oleh Soekarno karena dicurigai terlibat dalam percobaan kudeta dan tindak pidana korupsi.³²

Bagi Soeharto meskipun surat tersebut terdapat banyak versi kemudian, tidak menyurutkan Soeharto untuk mengeluarkan surat keputusan, di Jakarta, tertanggal 12 Maret 1966. keputusan Presiden/Pangti ABRI/KOTI Nomor 1/3/1966 tentang pembubaran PKI dan ormas-ormasnya di seluruh Indonesia.

³² R.E. Elson, *Suharto; Sebuah Bigrafi Politik* (Jakarta: Pustaka Minda Utama, 2005) h. 266-267

Disusul 18 Maret, keputusan menahan 15 menteri dan mengangkat sejumlah menteri *ad interim* mengisi pos-pos kosong.³³

“Reaksi terkejut presiden baru muncul setelah menerima laporan bahwa Men/Pangad telah membubarkan PKI dengan dasar surat perintah yang ia berikan. Presiden lalu mengeluarkan surat perintah susulan yang kemudian disampaikan khusus kepada Letjen Soeharto oleh Waperdam II Leimena pada 13 Maret 1966. Akan tetapi, Soeharto tidak memberikan reaksi. Sementara itu, ketiga jenderal yang datang ke Bogor sama sekali tidak pernah bertemu dengan Presiden Soekarno sesudah itu....”³⁴

Menurut Asvi Warman Adam terdapat dua kekeliruan dalam naskah Supersemar baik dari penggandaan (stensilan) maupun penafsiran yang kemudian terjadi. Dalam kasus Supersemar yang paling menarik adalah ketidak samaan isi dan pesan surat, antara yang mengeluarkan perintah dan menerima perintah. Bagi presiden Soekarno, surat itu hanya perintah pengamanan, bukan *transfer of authority*. Sedangkan orang-orang dekat Soeharto, seperti Amirmachmud, melihatnya sebagai “hal yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi saat itu.”³⁵

Soeharto sendiri kemudian menterjemahkan surat tersebut untuk membubarkan PKI, menangkap 15 menteri yang loyal terhadap Soekarno,

³³, Bagus Darmawan (ed), *Warisan (daripada) Soeharto*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2008), h. 62

³⁴ *Ibid.*, h. 63

³⁵ Asvi Warman Adam “Pelajaran Dari Supersemar” dalam Bagus Darmawan (ed), *Warisan (daripada) Soeharto*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2008), h. 71

memulangkan pasukan Cakrabirawa yang setia kepada Presiden Soekarno, mengawasi berita ekonomi dan politik di RRI, TVRI dan media lain.³⁶

Gonjang-ganjing seputar Supersemar ternyata tidak menyurutkan kubu Soeharto untuk melakukan agenda yang telah ditetapkan. Dengan naiknya Nasution menjadi ketua MPRS pada bulan Juni 1966 berkat aksi menggalang dukungan yang dilakukan Jusuf. Dilanjutkan agenda utama, meningkatkan status Supersemar menjadi ketetapan MPRS. Langkah tersebut berhasil dan menutup Bung Karno untuk mencabut surat perintahnya. Sebab, sebagai Tap MPRS, pencabutan memerlukan persetujuan MPRS yang secara teknis sulit dilakukan oleh Soekarno. Akhir dari perjalanan Supersemar adalah penyerahan pemerintahan kepada Soeharto yang dilaksanakan pada 22 Februari 1967 yang dituntaskan lewat sidang Istimewa MPRS 7-12 Maret. Sidang MPRS tersebut kemudian mengeluarkan ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan Pemerintahan Negara dari tangan Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden.³⁷

³⁶ *Ibid.*, 71

³⁷ Bagus Darmawan (ed), *Warisan (daripada) Soeharto*, h. 63. lihat juga James Luhulima "Peristiwa G30S.", h. 310

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis meneliti, mendeskripsikan dan kemudian menganalisa data-data yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, yakni peranan militer dalam peristiwa G 30/S PKI maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dewan jenderal merupakan isu yang paling penting terhadap sebab timbulnya peristiwa pemberontakan G 30 S/PKI, adanya isu tentang kudeta yang akan di lakukan oleh beberapa dewan jenderal pada HUT ABRI pada tanggal 5 Oktober 1965 merupakan isu yang di lancarkan oleh beberapa kalangan yang hingga saat ini sama sekali belum jelas asal muasalnya, akan tetapi hal tersebut dimanfaatkan oleh PKI untuk kemudian merekatkan diri pada Soekarno dengan membawa isu tersebut. Hal ini tentu saja disambut positif oleh Soekarno yang sebelumnya telah kecewa dengan beberapa Pati yang tidak loyal padanya. Hal ini di tandai dengan di tolaknya gagasan tentang angkatan ke V oleh ABRI yakni tentang mempersenjatai sipil untuk kemudian ikut serta dalam mempertahankan kemerdekaan RI serta dengan tindakan tidak sepenuh hati para pati untuk mengganyang Malaysia.
2. Di perkirakan ± 1 juta nyawa bangsa Indonesia melayang hanya karena demi pemusnahan dan penghancuran PKI yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia akan tetapi hal itu merupakan sifat arogansi militer yang dengan dalih telah kehilangan beberapa jenderal nya lantas

melegalkan menghukum seseorang tanpa persidangan terlebih dahulu. Penangkapan beberapa anggota militer yang dianggap terlibat pun dilakukan dengan cepat di antaranya: Letnan Satu Infanteri Dul Arief selaku komandan pasopati G30S, Kolonel Infanteri Abdul Latief anggota Sentral Komando G30S, Panglima Angkatan Udara Omar Dani, Kolonel Marinir Bambang Widjanarko (Ajudan Presiden Soekarno) dll.

3. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Soeharto selaku Pangkostrad saat itu yang kemudian secara kontroversi di angkat menjadi Pangkopkamtib oleh Soekarno berhasil dalam menghancurkan PKI yakni: mencuatkan isu Atheisme yang di jadikan sebagai landasan bagi PKI, adanya pertentangan-pertentangan PKI dan kaum muslim sebelum peristiwa G30S tersebut, melarang beberapa media baik elektronik maupun cetak untuk mengeluarkan penerbitan kecuali media atau Koran yang berafiliasi pada ABRI seperti : Berita yudha, Harian Bersenjata Republik Indonesia. Hal tersebut di lakukan untuk mengontrol pemberitaan yang selaras dengan ABRI selaku pemegang kendali keamanan pasca peristiwa tersebut, 4.
4. Terdapat kontroversi pemberitaan tentang kekejaman dan penyiksaan (masih kontroversi) PKI yang di lakukan terhadap para jenderal yang telah di culik yang secara tidak langsung menyulut kemarahan warga Indonesia untuk kemudian di jadikan sarana oleh Soeharto dan militer untuk mempercepat pemusnahan PKI.
5. Pasca peristiwa G 30S PKI, Soeharto dan militer mempunyai posisi kekuasaan yang sangat dominan, apalagi setelah soekarno yang di

lengserkan secara absolut karena laporan pertanggungjawabannya di tolak oleh MPRS yang di pimpin oleh Nasution yang kemudian di beri judul NAWAKSARA I & II karena Soekarno di anggap terlibat secara tidak langsung dalam peristiwa G 30 S PKI.

6. Sampai detik ini, tidak terdapat kesimpulan pasti tentang siapa sesungguhnya aktor utama dari peristiwa G 30 S PKI karena masing-masing tertuduh memiliki argumentasi yang rasional untuk kemudian dikembangkan menjadi tersangka, antara lain:
 - a. Soekarno mempunyai sifat arogansi kepemimpinan yang tinggi, sebagai pemimpin tertinggi negara dan panglima angkatan bersenjata Republik Indonesia tentu harus mengetahui adanya gerakan mencurigakan di negaranya. adanya pertemuan Soekarno dengan Untung, Sabur dan Aidit di kamar pribadinya 2 hari sebelum peristiwa tersebut meletus. Soekarno pun sudah mulai muak dengan beberapa pati yang menolak gagasan angkatan ke V dan perjuangan setengah hati pati untuk mengganyang Malaysia.
 - b. Mayjen Soeharto merupakan Pangkostrad dan termasuk pati yang berpengaruh terhadap kebijakan militer saat itu, akan tetapi tidak masuk dalam daftar para jenderal yang akan di culik, adanya pertemuan Soeharto dan Untung pada malam peristiwa tersebut, ketika dia sedang menunggu Tommy (putranya) di rumah sakit, bahkan di kabarkan Untung melapor tentang tindakan yang akan di

- c. CIA (Central Intelligence of America) yang notabennya bertugas mengawasi pergerakan negara berkembang seperti Indonesia. Amerika sangat khawatir akan kedekatan Indonesia dengan Peking yang notabennya merupakan negara Komunis.

Soeharto dan militer kemudian menjalankan Dwi Fungsi yang menurut penulis sudah keluar dari fungsi dasarnya. Yakni sebagai alat pertahanan Negara.

B. Saran

Sebagai sebuah bentuk sikap kritis dari penulis sekaligus merupakan bagian dari komponen masyarakat Indonesia yang merasa peka terhadap fenomena bangsa, memandang peristiwa berdarah yang tercipta dari keganasan serta kebiadaban PKI, penulis walaupun masih dalam garis skeptisis dalam pemahaman tentang fakta dibalik peristiwa G 30 S/PKI ini, walaupun masih dalam tahap belajar menyarankan kepada alat pertahanan bangsa sebaiknya menyeragamkan fungsi sebagai alat untuk mempertahankan keamanan bangsa dan negara. Tanpa harus terlibat secara aktif dalam ranah politik praktis dalam rangka untuk memperoleh kembali butiran-butiran kekuasaan yang pernah diraih pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, akan tetapi militer yang hidup pada masa reformasi ini hendaknya mampu menjadi tameng yang sesungguhnya sebagai alat pertahanan keamanan bangsa yang tujuan aslinya sebagai penyelamat bukan perusak. Adapun kriteria militer sebagai penyelamat tersebut dapat diaplikasikan

sebagai sebuah organisasi pertahanan keamanan bangsa mendorong untuk selalu memberikan pelajaran serta pendidikan kepada masyarakat luas akan pentingnya menerapkan serta mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta sifat nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mampu memfilter kebudayaan luar bahkan ideologi yang masuk. Dengan cara pemanfaatan media massa baik elektronik maupun visual untuk memberikan pemberitahuan dan pembelajaran tentang mana yang baik dan mana yang buruk untuk dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Selain itu penulis juga menyarankan, alangkah baiknya serta bagusnya jika kita semua, selaku komponen bangsa mampu mengapresiasi secara kooperatif semua tindakan kita yang progresif dalam rangka membangun dan mempertahankan jati diri sebagai bangsa yang bermartabat untuk selalu mempertahankan serta memelihara persatuan dan kesatuan antara sesama. Dengan tidak membiarkan anasir-anasir atau perilaku-perilaku yang dapat merongrong serta menjatuhkan kredibilitas kita sebagai suatu bangsa yang memiliki martabat yang luhur yang senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan menjadikan UUD 1945 sebagai falsafah kehidupan untuk mendapatkan kehidupan berbangsa yang lebih baik. Tanpa mudah terombang-ambing dalam menerima pengaruh, baik pengaruh politis, ideologi, agama maupun budaya. Jika semua sudah teraplikasikan dalam semua komponen serta mekanisme berfikir pada tiap-tiap individu bangsa keutuhan, persatuan serta kesatuan akan selalu terpelihara. *Wallahu'alam bi shawab.*

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1990.
- Ali, Fahry. *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan, Kecharusan Demokratisasi Dalam Islam Indones*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Anwar, Rosihan. *Sukarno, Tentara, PKI; Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961-1965*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1980
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arif, Saiful. *Ilusi Demokrasi*, Jakarta : Desantara, 2003
- Bakti, Ikrar Nusa et.al. *Tentara yang gelisah Hasil Penelitian YIPIKA tentang Posisi ABRI dalam Gerakan Reformasi*, Bandung : Mizan 1999
- Budiardjo, Miriam *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Cholisin, *militer dan Gerakan Pro Demokrasi Indonesia: Study Analisis Tentang Respon Militer Terhadap Gerakan Pro Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002.
- Crouch, Harould. *Militer dan Politik Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Dake, Antonio C.A. *Soekarno File: Kronologi Suatu Keruntuhan*. Penerjemah Loek Pattiradjawane, Jakarta: Aksara Karunia, 2006
- Darmawan, Bagus (ed). *Warisan (daripada) Soeharto*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2008
- Dwipayana, G. dan Ramadhan KH, *Otobiografi Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya*, Jakarta : Cipta Lantoro Agung Persada, 1989.

- Elson, R.E. *Suharto; Sebuah Bigrafi Politik*, Jakarta: Pustaka Minda Utama, 2005
- Fatah, Eep Saipullah, *Penghianatan Demokrasi Ala Orde Baru: Masalah dan Masa Depan Demokrasi Terpimpin Konstitusional*, Bandung: Rosda Karya, 2000.
- Fatah, Abdoel. *Demiliterisasi Tentara Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*, Yogyakarta: LKIS, 2005.
- Finer, S.E, *The Man on Hoseback: The Role of Military in politics*, New York: Frederick A. Praeger, 1962.
- Hatta, Mohammad, *Demokrasi Kita*, Jakarta: Pandji Masyarakat, 1960.
- Iswandi. *Bisnis Militer orde baru: Keterlibatan ABRI Dalam Bidang Ekonomi dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Rezim Otoriter*, Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya 2000.
- Karim, Muhammad Rusli, *Peranan ABRI Dalam Politik* , Jakarta: Hajimas Agung, 1993.
- Leirissa, RZ dan Zulfikar (ed). *Sejarah Nasional Di Indonesia: Lahir dan Perkembangnya Orde Baru*, Jakarta : Proyek Inventarisasi dan Dokumen Sejarah Nasional, 1993.
- Liddle, R. William. *Pemilu-Pemilu Orde Baru Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Penerjemah Nung Katjasungkana, Jakarta: LP3ES, 1992
- Ma'arif, A. Syafi'I, *Islam dan Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kali Jaga Press, 1998.
- *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1994.

- Moerdianto, G. *Indonesia Abad ke 20 dari Kabangkitan Nasional sampai Linggar Jati*, Jakarta : Kanisius ,1992
- Muhaimin, Yahya A *Perkembangan Militer Dalam Politik Indonesia 1945-1966*, Yogyakarta: UGM Press, 1982.
- Mint, Jeanne S. *Marx, Marhaen, Akar Sosialisme di Indonesia*, Terj. Zuhilmiyasari, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002
- Notosusanto, Nugroho (ed). *Pejuang dan Prajurit, Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.
- Pringgodigjo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Jakarta : 1986
- Said, Salim, *the Genesis of Power: Civil-Military relation in Indonesiaia During The War for Independence 1945-1949*, Thesis, Ohio state University, 1985.
- Sanit, Arbi. *Badai Revolusi : Sebuah Sketsa Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000.
- *Tumbuh dan Tumbangnya Dwi Fungsi : Perkembangan Politik Militer Indonesia 1958-2000*, Jakarta : Aksara Karunia, 2002
- Singaribun, Masri dan Sofian Effendi (ed), *Metode Peneletian Survai*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Simanjuntak, Togi, ed. *Premanisme Politik*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2000.
- Soebijono [dkk]. *Dwi Fungsi ABRI Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995

Soebandrio, *Peristiwa G 30 S (Sebelum, saat meletus dan sesudahnya)*. Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2006

Suhelmi, Suhelmi. *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta: Gramedia pustaka Utama, 2001.

Sularto, St (Ed). *Dialog dengan Sejarah; Soekarno Seratus Tahun*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001

Suryabrata, Sunadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Dokumen lain (Skripsi, Jurnal, Majalah, Buletin, dan Website)

Departemen Penerangan RI. *Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN): Ketetapan MPR RI NO IV MPR 1978*, Jakarta : Deppen RI, 1978.

Nasution, AH. *Dwi Fungsi ABRI: Pada mulanya dan Kini*, dalam Majalah Prisma, Edisi 12 Desember 1980.

Kendedes, Iin. *Implikasi Dwi Fungsi ABRI terhadap Partai Persatuan Pembangunan*, Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2004

Abar, Akhmad Zaini (ed). *Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru: Esai-Esai dari Fisipol Bulak Sumur*, Kumpulan Makalah (t.d).

MABES ABRI, *Bahaya Laten Komunis di Idonesia, Perkembangan Gerakan dan Penghianatan Komunisme di Indonesia*, (Jakarta : Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1991

Yoseph Tugio Taher, *G30S dan Soeharto*. Artikel diakses pada 25 Mei 2010 dari

<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=8&dn=20080928163306>

“Biografi Soeharto” Artikel diakses pada 25 mei 2010 dari

<http://www.wattpad.com/79641-biografi-soeharto>

“Biografi Soeharto” diakses tanggal 25 Mei 2010 dari [http://eh.web.id/biografi-](http://eh.web.id/biografi-mantan-presiden-soeharto/)

[mantan-presiden-soeharto/](http://eh.web.id/biografi-mantan-presiden-soeharto/) atau link download

http://downloads.ziddu.com/downloadfile/633568/U_BIOGRAFI_PAK_SO

[EHARTO.zip.html](http://downloads.ziddu.com/downloadfile/633568/U_BIOGRAFI_PAK_SO)

“Tragedi Nasional Peristiwa Madiun PKI, DI/TII, G 30 S/PKI, Dan Konflik-konflik Internal lainnya.” Artikel diakses pada 25 mei 2010 dari

http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Tragedi_Nasional_Peristiwa_Madiun

[_PKI,_DI/TII,_G_30_S/PKI,_Dan_Konflik-](http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Tragedi_Nasional_Peristiwa_Madiun)

[konflik_Internal_Lainnya_9.2_\(BAB_12\)](http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Tragedi_Nasional_Peristiwa_Madiun)